

SKRIPSI
PERILAKU POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF *INCUMBENT*
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
SOREANG



OLEH
M.IKHRAM
NIM :2020203869201023

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026 M / 1448 H

**PERILAKU POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF *INCUMBENT*
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
SOREANG**



**OLEH
M.IKHRAM
NIM :2020203869201023**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat sebagai untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S,Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M / 1448 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent*
Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
Soreang

Nama Mahasiswa : M. Ikham
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203869201023
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B 2230/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. (.....)

NIP : 19760713 200912 1 002

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I.
NIP. 19760713 200912 1 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent*
Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
Soreang

Nama Mahasiswa : M. Ikham

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203869201023

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Sosiologi Agama

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B 2230/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 11 Mei 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. (Ketua)

Nahrul Hayat, M.I.Kom. (Anggota)

Wahyuddin Bakri, M.Si. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I.
NIP. 19760713 200912 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Tiada kata selain ucapan rasa syukur tak terhingga karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa yang tulus dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi sangat berharga. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, kerendahan hati, dan ketulusan jiwa, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Mangguling dan Ibunda tersayang Rosdiah yang telah senantiasa menyertai, mendoakan dengan tulus, dan memberikan dukungan maupun materil dengan penuh cinta kasih yang tak terbatas. Tidak lupa pula kepada saudara terkasih yakni Muhammad Iksdar dan Muhammad Ikhsar yang telah memberikan dukungan penuh dan semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

3. Dr.H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing dan memberi arahan hingga skripsi ini selesai.
4. Nahrul Hayat, M.I.Kom selaku dosen penguji utama yang telah memberi arahan hingga skripsi ini selesai.
5. Wahyuddin Bakri, M.Si. selaku dosen penguji pendamping yang telah memberi arahan hingga skripsi ini selesai.
6. Andi Nurul Mutmainnah, M.Si. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama.
7. Wahyuddin Bakri, M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan.
8. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Parepare yang memudahkan penulis mencari referensi bacaan selama mengerjakan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sosiologi Agama yang telah dengan ikhlas mentransfer ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman berharga, dan memberikan kebijaksanaan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepada anggota DPRD Kecamatan Soreang dan masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan data selama proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juni 2026 M
3 Muharram 1448 H

Penulis



M. Ikhlam

NIM. 2020203869201023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M.Ikhram
NIM : 2020203869201023
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 17 Desember 2001
Program Studi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Perilaku Politik Anggota Legislatif
Incumbent Terhadap Pelayanan Publik di
Kecamatan Soreang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2026

Penyusun



M.Ikhram

NIM. 2020203869201023

ABSTRAK

M.Ikhram. *Perilaku Politik Anggota Legislatif Incumbent Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang* (dibimbing oleh H. Muhiddin Bakri)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Topik ini penting karena pelayanan publik di tingkat kelurahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakjelasan waktu pengurusan administrasi dan kurangnya responsivitas aparatur. Dalam hal ini, peran DPRD sebagai lembaga representatif dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan menjadi sangat strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dalam menjalankan perannya terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perilaku politik anggota legislatif *incumbent* secara umum dinilai positif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mereka dianggap representatif dan responsif dalam menyerap serta menindaklanjuti aspirasi, didukung oleh peran aktif dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Selain itu, kemampuan komunikasi dan pendekatan persuasif turut memperkuat kepercayaan masyarakat. 2) Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut terdiri dari faktor internal, seperti pengalaman, pemahaman peran, dan komitmen, serta faktor eksternal, seperti keterbatasan anggaran, kebijakan pemerintah, perbedaan kepentingan, serta kondisi birokrasi dan infrastruktur. Secara keseluruhan, perilaku politik *incumbent* cenderung adaptif dan realistis dalam menyesuaikan pelayanan publik dengan kondisi yang ada.

Kata kunci: Perilaku politik, legislatif *incumbent* , pelayanan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERRSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Sistem politik.....	13
2. Teori Pilihan Rasional	16
C. Kerangka Konseptual	17
D. Kerangka Pikir.....	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 27
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	27
1. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	28
C. Fokus penelitian.....	29

D. Jenis dan sumber data.....	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Perilaku Politik Anggota Legislatif <i>Incumbent</i> Terhadap Pelayanan Publik	38
a. Perilaku Representatif dan Responsif.....	38
b. Perilaku Advokasi Kebijakan	45
c. Perilaku Komunikatif dan Persuasif	51
2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Anggota Legislatif <i>Incumbent</i> Terhadap Pelayanan Publik	55
a. Faktor Internal.....	55
b. Faktor Eksternal	60
B. Pembahasan	71
1. Perilaku Politik Anggota Legislatif <i>Incumbent</i> terhadap Pelayanan Publik	71
a. Perilaku Representatif dan Responsif.....	71
b. Perilaku Advokasi Kebijakan	75
c. Perilaku Komunikatif dan Persuasif	80
2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Anggota Legislatif <i>Incumbent</i> Terhadap Pelayanan Publik	84
a. Faktor Internal.....	84
b. Faktor Eksternal.....	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98
BIODATA PENULIS.....	126



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Nama Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Berpikir	22



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Keterangan Pembimbing	Terlampir
3	Surat Izin Penelitian dari Kampus	Terlampir
4	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian	Terlampir
6	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
7	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Terlampir
8	Turnitin	Terlampir
9	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	tedan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	esdan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	komaterbalikkeatas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litrans literasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyyatau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
ثَنِيَّةٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُدًى فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دون	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat serta memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Keberadaan DPRD diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 3 yang menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” DPRD Kabupaten/Kota sendiri adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten atau kota, yang terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah dan tidak berada di bawah maupun di atasnya. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi yang diwujudkan melalui perumusan dan penetapan peraturan daerah bersama kepala daerah, fungsi anggaran yang dilaksanakan melalui pembahasan, persetujuan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama pihak eksekutif, serta fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mengontrol pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, kebijakan kepala daerah, dan berbagai keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.²

¹Abdul Rohim, “Perilaku Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Kader Parpol Dan Wakil Masyarakat,” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021, 1–100.

²Erik Porawouw, “Tugas Dan Fungsi Dprd Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Menurut Uu No 27 Tahun 2009,” *Lex Administratum* 2, no. 2 1–17.

Anggota DPR maupun DPRD dalam suatu lembaga legislatif merupakan wakil rakyat yang memperoleh kursi melalui proses pemilihan umum. Di antara mereka terdapat anggota yang kembali terpilih untuk masa jabatan berikutnya atau disebut sebagai *incumbent*. Khusus di Kota Parepare, terutama di Kecamatan Soreang yang menjadi lokasi penelitian, terdapat anggota DPRD yang kembali terpilih (*incumbent*) dan melanjutkan masa jabatannya untuk periode 2024–2029. Mereka merupakan wakil rakyat yang tetap dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan tugas dan fungsi legislatif pada periode tersebut. Keberadaan anggota legislatif *incumbent* tersebut tidak terlepas dari sistem demokrasi dan pemilu yang terus mengalami perubahan dalam struktur maupun mekanisme politik guna membuka ruang partisipasi politik masyarakat yang lebih luas.³ Melalui sistem pemilu tersebut, diharapkan tercipta iklim demokrasi yang lebih adil, transparan, serta terbebas dari kepentingan kelompok tertentu, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan wakil rakyat yang dianggap mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan publik.

Motivasi anggota legislatif *incumbent* untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan legislatif dapat dijelaskan melalui pendekatan Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman. Teori ini menyatakan bahwa individu bertindak berdasarkan pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan preferensi dan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, anggota legislatif *incumbent* terdorong untuk mencalonkan diri kembali karena mereka menilai bahwa langkah tersebut akan memberikan manfaat politik, sosial, atau ekonomi yang sejalan dengan tujuan pribadi atau kelompok mereka.⁴

Menurut Pramono dalam Riana Hartati, perilaku politik mencakup berbagai aspek, seperti legitimasi dalam pengaturan kekuasaan, proses penyusunan kebijakan

³ Wahyuddin Bakri, *Hegemoni Politik, Kekuasaan, Dan Media* (Parepare: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 1-2.

⁴Choirifiqa Widya Nadzifah Wira, “Hubungan Personal Kandidat, Program Kandidat, Dan Lingkungan Sosial Pemilih Terhadap Orientasi Memilih Generasi Millennial Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” (Universitas Airlangga, 2019).

pemerintah, aktivitas partai politik, tindakan aparat negara, serta keterlibatan masyarakat melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan politik.⁵ Perilaku politik tersebut menunjukkan bahwa aktivitas politik tidak hanya berkaitan dengan perebutan dan penggunaan kekuasaan, tetapi juga menyangkut bagaimana aktor politik menjalankan fungsi representasi, komunikasi, dan pengambilan kebijakan di tengah masyarakat. Dalam konteks negara multikultural, seluruh dimensi perilaku politik tersebut diuji oleh berbagai potensi konflik horizontal yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, keterlibatan aktif aktor politik dan masyarakat menjadi penting, tidak hanya untuk mempertahankan kekuasaan politik, tetapi juga untuk menjaga integrasi sosial,⁶ menciptakan stabilitas politik, serta mendorong penyelesaian konflik sosial keagamaan secara damai demi menjaga keberlangsungan sistem politik yang ada.

Huntington dan Nelson dalam Ihsan Hamid, mengklasifikasikan perilaku politik ke dalam dua jenis. Pertama, partisipasi otonom, yaitu keterlibatan dalam aktivitas politik yang didasari oleh kemauan individu sendiri tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Kedua, partisipasi mobilisasi, yaitu keterlibatan dalam kegiatan politik yang terjadi karena adanya pengaruh atau dorongan dari pihak lain, bukan berdasarkan inisiatif atau kesadaran pribadi.⁷ Berdasarkan dari definisi perilaku politik yang ada diatas, perilaku politik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk interaksi yang terjadi dalam lingkup politik, baik antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintahan, maupun antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Interaksi ini mencakup proses perumusan, pelaksanaan, dan penegakan kebijakan atau keputusan politik. Selain itu, perilaku politik dapat dibedakan menjadi partisipasi otonom, yaitu keterlibatan individu dalam politik berdasarkan

⁵ Riana Hartati, dkk "Perilaku Politik Budaya Jawa Dalam Warga Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur," *Politics and Islamic Civilization* 2, no. 1 (2021): 15–24.

⁶ Muhiddin Bakri, "Merenden Tedong Di Mamasa: Integrasi Pendekatan Struktural Dan Kultural Dalam Memitigasi Konflik Sosial Keagamaan," *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024): h. 179, <https://doi.org/DOI: http://10.24256/pal.v9i2.5220>.

⁷ Ihsan Hamid, *Perilaku Politik Dialektika Teoritis Empiris Untuk Penguatan Demokrasi Di Era Post Truth*, ed. Muhammad Amalanif (Sanabil, 2020).

inisiatif sendiri, dan partisipasi mobilisasi, yaitu keterlibatan yang dipengaruhi atau diarahkan oleh pihak lain.

Pembahasan perilaku politik ada berbagai macam bentuk perilaku yang akan terlihat seperti respon terhadap aspirasi masyarakat hal ini tentu akan berdampak pada pelayanan publik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa anggota legislatif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi aspirasi mereka kepada anggota legislatif secara langsung. Seperti halnya dalam kegiatan Reses / Kunjungan Dapil yang digelar oleh anggota komisi II DPRD Kota Parepare di kegiatan itu anggota komisi II DPRD Parepare mengatakan bahwa kegiatan “Reses / Kunjungan Dapil ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, serta untuk mendengarkan langsung aspirasi dan juga permasalahan yang terjadi di Kecamatan Soreang,”⁸

Menurut Kurniawan dalam Ahmad, tingkah laku aparatur pemerintah di tingkat daerah kerap menjadi faktor penyebab ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Proses pelayanan, yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat atau individu yang berurusan dengan organisasi, harus dilakukan sesuai dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan.⁹ Dengan hal ini tentu berbagai bentuk perilaku politik anggota legislatif *incumbent* akan sangat berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian Andi Muhammad Ridwan, di Kantor Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, menemukan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kendala yang muncul berkaitan dengan lamanya waktu pelayanan, khususnya saat masyarakat mengurus surat keterangan pengganti e-KTP. Masyarakat menilai bahwa proses penerbitan surat tersebut tidak memiliki kepastian waktu sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi

⁸Admods, “Anggota DPRD Parepare Andi Fudail Reses/ Kunjungan Dapil, Serap Dan Siap Perjuangkan Aspirasi Warga Soreang,” Delik.id, 2024.

⁹Ahmad K, “Respon Masyarakat Terhadap Perilaku Aparat Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan,” *Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 190–97.

pemohon. Selain itu, ditemukan pula sikap aparaturnya yang kurang responsif terhadap warga yang membutuhkan pelayanan serta masih adanya pegawai yang belum memahami secara menyeluruh prosedur pelayanan. Kurangnya sikap tanggap dari petugas ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat, padahal mereka berharap mendapatkan pelayanan yang cepat dan baik.¹⁰

Permasalahan pelayanan publik di tingkat kelurahan, misalnya ketidakjelasan waktu dalam pengurusan surat keterangan pengganti e-KTP serta sikap aparaturnya yang kurang tanggap, bukan hanya mempengaruhi kepuasan masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan peran anggota DPRD. Hal ini disebabkan DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk menjamin pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan, fungsi anggaran guna memastikan tersedianya dukungan sumber daya, serta fungsi legislasi dalam menyusun peraturan daerah yang dapat meningkatkan mutu pelayanan. Oleh karena itu, DPRD berperan penting dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya, tentu menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dalam hal ini anggaran yang terbatas. Dalam hal ini meskipun DPRD Parepare berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan baik, berbagai tantangan tetap muncul. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Ketika pendapatan menurun, DPRD harus membuat keputusan sulit mengenai prioritas dalam pengeluaran. Contohnya, proyek pembangunan infrastruktur harus ditunda demi mendanai layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan¹¹ Tentu berdasarkan dari kendala yang ada dijelaskan diatas perilaku anggota legislatif *incumbent*

¹⁰Andi Muhammad Ridwan, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Efektifitas Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Pelayanan Masyarakat Pada Kelurahan Wattangsoreang Kecamatan Soreang Kota Parepare," *Jurnal Nobel Management Review* 3, no. 3 (2022): 452–464.

¹¹Kaira, "Laporan Kinerja Anggaran DPRD Parepare," dprdparepare.org, 2025.

terhadap pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Soreang diharapkan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh dan karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku politik anggota legislatif *incumbent* serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik.

Masyarakat selalu berharap ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah dan apa yang mereka sampaikan dapat segera mendapat perhatian dan ditangani dengan cepat. Namun, meskipun masyarakat telah menyampaikan pengaduan, masih banyak yang belum memahami bagaimana sistem ini bekerja. Mereka tidak tahu lembaga pemerintah mana yang bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang mereka ajukan.¹²

Menilai hasil kinerja anggota legislatif *incumbent* yang kembali terpilih secara umum sudah cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap realisasi sejumlah program pelayanan publik, seperti program rumah impian, bedah rumah, serta perbaikan infrastruktur jalan yang sebelumnya rusak dan kini sudah layak digunakan. Selain itu, janji-janji kampanye yang berkaitan dengan bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai telah memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh sebagian warga, sehingga membangun kepercayaan dan kedekatan antara masyarakat dengan anggota legislatif tersebut.

Dari hasil wawancara ini juga mengungkap adanya catatan kritis dari masyarakat terkait pelaksanaan program bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Informan menyampaikan bahwa masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, di mana sebagian warga yang dianggap sudah tidak layak masih menerima bantuan, sementara warga lain yang lebih

¹²Siti Widharetno Mursalim, "Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Di Kota Bandung," *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)* XV, no. 1 (2018): 1–16.

membutuhkan justru belum terakomodasi. Selain itu, kebutuhan terhadap program bedah rumah atau rumah impian masih cukup tinggi, termasuk bagi warga yang sebelumnya pernah menerima bantuan namun kini tidak lagi mendapatkannya meskipun kondisi ekonomi dan tempat tinggal mereka masih memprihatinkan. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya evaluasi dan peninjauan ulang terhadap data penerima bantuan agar program pelayanan publik dapat berjalan lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.¹³

Berdasarkan observasi atau wawancara bersama salah satu masyarakat diketahui bahwa anggota legislatif *incumbent* di Kecamatan Soreang cukup dikenal oleh masyarakat, dan secara umum, warga merasa cukup puas dengan kinerja mereka, terutama dalam hal bantuan sembako, perbaikan jalan, dan program bedah rumah. Namun, ada keluhan mengenai ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial seperti PKH, di mana beberapa penerima yang dinilai sudah tidak layak masih menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan. Selain itu, masih banyak warga yang berharap mendapatkan program bedah rumah karena kondisi tempat tinggal mereka kurang layak. Oleh karena itu, masyarakat berharap ada evaluasi dan peninjauan ulang agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan merata.

Banyak keluhan masyarakat tidak dapat langsung ditindak lanjuti atau diselesaikan. Ada berbagai faktor yang menjadi penghambat, seperti proses administrasi yang panjang, keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan, hingga masalah birokrasi yang memperlambat respons faktor penghambat dalam penanganan pengaduan masyarakat, termasuk prosedur operasional standar yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai, batasan kewenangan, serta keterbatasan

¹³ Hisnaeni, Masyarakat Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Wawancara di Parepare, 28 Februari 2025.

anggara.¹⁴ Akibatnya, masyarakat merasa pelayanan yang didapatkan serta keluhan mereka tidak sepenuhnya dihiraukan, dan pelayanan publik yang seharusnya optimal tidak berjalan seperti yang diinginkan.

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan administrasi. Salah satu indikator utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah respons atau tanggapan dari pejabat yang berwenang terhadap keluhan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.¹⁵

Dengan demikian, penelitian tentang "**Perilaku Politik anggota legislatif Incumbent terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang**" merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara representasi politik dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan Soreang dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik?

¹⁴Nur Rohmah, "Evaluasi Responsivitas Sistem Penanganan Dan Pengaduan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Kota SEMARANG," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, no. 1 (2023): 1–14.

¹⁵Dominggas K. Tuaputimain and Fientje Palijama, "Optimalisasi Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Kamarian Kabupaten Seram Bagian Barat," *Hipotesa - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 2 (2024): 1–13,.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan pelayanan publik

D. Kegunaan penelitian

Dari tujuan yang ada di atas, diharapkan dari hasil penelitian ini akan berguna khususnya untuk hal-hal berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini harapannya dapat menciptakan sebuah argumentasi dalam bidang ilmu sosial agar masyarakat atau siapa saja dapat menciptakan pandangan-pandangan baru dalam melihat perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat membantu pengembangan penelitian, terkhusus di bidang Pemahaman Nilai Agama dalam Politik, Mendorong Toleransi dan Kerjasama, Peningkatan Kualitas Pelayanan. Hasil-hasilnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan dan dibaca oleh siswa dan mahasiswa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan sebagai salah satu panduan penulis sebab ini bisa bersifat teoritis ketika menelaah penelitian yang dilakukan. Penulis mengulas beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan, disparitas, menghindari plagiasi, serta acuan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian ini berjudul “Perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di kecamatan Soreang” dan setelah membaca hasil dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian serta memiliki kesamaan dalam pembahasan atau gambaran umum masalah yang ingin dikaji oleh penulis.

1. Iqbal Syafrudin, Universitas Negeri Jakarta tahun 2021 “Peran anggota badan legislatif perempuan dalam perspektif gender (study perilaku politik 2 anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia)” bahwa gender dan perilaku politik secara regulasi dan aturan tidak ada masalah dan bahkan lebih menguntungkan perempuan tapi memang dalam praktek dilapangan disaat kampanye dan bahkan ketika terpilih disitu letak kesulitan dan tantangannya. Tentu sesuai apa yang dialami oleh kedua anggota DPRD DKI Jakarta F-PSI.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada tujuan penelitian yang digunakan Iqbal Syafrudin, mengkaji mengenai peran anggota legislatif perempuan di DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI dalam mewujudkan kesetaraan gender di Komisi yang mereka duduki, sedangkan peneliti mencoba dengan topik penelitian yang cukup luas. Adapun sisi

¹⁶Iqbal Syafrudin, Idris Ahmad, and August Hamonangan, “Peran Anggota Badan Legislatif Perempuan Dalam Perspektif Gender (Study Perilaku Politik 2 Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia) Nama,” *Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 176–81.

kemiripan pada penelitian yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi serta dokumentasi.

2. Bella Putriwani, dkk Universitas Bangka Belitung tahun 2022 “Strategi Politik *incumbent* dan faktor-faktor penyebab kekalahan pada pemilihan legislatif 2019 Kabupaten Bangka” Bahwa Strategi politik yang digunakan para *incumbent* yang kalah pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Bangka dan faktor penyebab kekalahan *incumbent* Kabupaten Bangka pada pemilihan legislatif 2019. Berdasarkan temuan di lapangan dapat ditarik kesimpulan yakni strategi politik yang digunakan para *incumbent* di Kabupaten Bangka pada pemilihan legislatif 2019 adalah strategi ofensifnya (meningkatkan jumlah suara) yang terdiri dari strategi yang digunakan pada politisi pada umumnya seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat.¹⁷ Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada teori yang digunakan , penulis menggunakan teori pilihan rasional untuk memberikan kerangka evaluasi untuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif sedangkan penelitian Bella Putriwani teori strategi politik menurut Schroder dalam penelitiannya. Adapun sisi kemiripan pada penelitian yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi serta dokumentasi.
3. Nurfadilah Nasiruddin, dkk. Universitas Sulawesi Barat, Majene tahun 2022 “Strategi *Incumbent* dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Maros” bahwa strategi *incumbent* dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif yakni komunikasi yang intens dengan masyarakat, bukan saja pada saat akan pemilihan tetapi jauh sebelum pemilihan akan dimulai, selain

¹⁷Bella Putriwani,Dkk “Strategi Politik *Incumbent* dan Faktor-Faktor Penyebab Kekalahan Pada Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Bangka Bella Putriwani Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung,Fakultas Ilmu Sosial Dan I,” *JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2022, 1–9.

komunikasi *incumbent* juga memiliki pendekatan kekeluargaan yang kesemuanya dapat dibagi dengan tiga pendekatan.¹⁸

Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada teori yang digunakan, penulis menggunakan teori sistem politik untuk memberikan kerangka evaluasi untuk menganalisis bentuk perilaku politik anggota legislatif *incumbent* sedangkan penelitian Nurfadilah Nasiruddin menggunakan teori pola interaksi sosial dalam penelitiannya. Adapun sisi kemiripan pada penelitian yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi serta dokumentasi.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sistem politik

a. Asumsi dasar teori Sistem politik

Menurut Easton, dalam Iqbal Fadrullah, sistem politik berfungsi sebagai sarana untuk mengubah berbagai tuntutan masyarakat (*input*) menjadi kebijakan yang mencerminkan distribusi nilai-nilai yang bersifat otoritatif (*output*), serta memperoleh dukungan lanjutan melalui mekanisme umpan balik. Dalam kerangka sistem politik ini, terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah, di mana masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi atau tuntutan, yang kemudian diproses oleh pihak yang memiliki wewenang agar menghasilkan kebijakan yang sesuai.¹⁹

David Easton dalam Ihsan Wira Senjaya, juga merumuskan secara singkat sejumlah karakteristik mendasar dari sistem politik, yang terdiri dari:

a) Karakteristik Identifikasi

¹⁸Nurfadilah Nasiruddin, dkk "Strategi *Incumbent* Dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Maros," *Jurnal Ilmu Sosial Politik* 5, no. 2 (2022): 193–202.

¹⁹Iqbal Fadrullah, dkk "Memahami Sistem Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang Dalam Perspektif Teori Gabriel Almond Dan David Easton," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2024): 208–19.

Untuk membedakan sistem politik dari sistem sosial lainnya, terdapat dua unsur penting:

1) Unit dalam Sistem Politik

Unit-unit ini mencakup tindakan-tindakan politik yang biasanya terorganisir dalam bentuk peran maupun kelompok politik. Setiap aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan dalam masyarakat termasuk dalam kategori ini.

2) Batasan Sistem Politik

Sistem politik memiliki batas-batas yang memisahkannya dari lingkungan sosial sekitarnya. Batas ini ditentukan oleh aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bersifat mengikat (*otoritatif*). Aksi-aksi sosial yang tidak memiliki ciri tersebut tidak dianggap bagian dari sistem politik.

b) Masukan dan Keluaran Sistem Politik (*Input* dan *Output*)

Agar sistem politik dapat terus berjalan dan menghasilkan kebijakan (*output*), ia memerlukan dukungan berupa masukan (*input*) secara berkelanjutan dari masyarakat, di mana efektivitasnya sangat bergantung pada dinamika perilaku politik aktor di dalamnya. Proses ini diawali oleh perpuatan komunikatif dan persuasif dari masyarakat maupun kelompok kepentingan untuk menyampaikan serta meyakinkan sistem mengenai urgensi tuntutan mereka. Tuntutan tersebut kemudian dikelola melalui perilaku advokasi kebijakan oleh para aktivis atau organisasi yang mengawal isu agar berhasil pengambil keputusan. Di dalam sistem, tuntutan ini direspons melalui perilaku representatif dan responsif oleh para pejabat publik yang bertindak sebagai wakil rakyat untuk menerjemahkan *input* tersebut menjadi tindakan nyata. Tanpa *input* yang diperjuangkan secara komunikatif dan diadvokasi dengan baik, sistem tidak akan berfungsi; sebaliknya, tanpa *output* yang representatif dan responsif, kita tidak bisa menilai kinerjanya. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas dari interaksi

perilaku-perilaku tersebut menjadi indikator utama yang menentukan efektivitas serta keberlanjutan sebuah sistem politik.

c) Diferensiasi dalam Sistem

Realita sistem politik yang kompleks tidak memungkinkan semua unit melakukan aktivitas yang sama secara serentak. Adanya pembagian peran ini menunjukkan diferensiasi fungsi dalam sistem politik.

d) Integrasi Sistem Politik

Pelaksanaan aktivitas yang berbeda secara bersamaan oleh berbagai unit memerlukan mekanisme integrasi guna menyatukan perbedaan yang muncul. Sistem politik harus mampu menyatukan anggota-anggotanya dalam tingkat kerja sama minimal agar tetap mampu mengambil keputusan kolektif yang mengikat dan tidak runtuh dalam proses pelaksanaan tugasnya.²⁰

Teori sistem politik David Easton menjelaskan bahwa sistem politik berfungsi sebagai mekanisme yang mengelola *input* dari masyarakat seperti tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi, untuk kemudian direspons dalam bentuk *output* berupa kebijakan publik yang bersifat *otoritatif*. Dalam konteks penelitian ini, perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dapat dilihat sebagai bagian dari proses internal dalam sistem politik, yang mempengaruhi bagaimana tuntutan masyarakat di Kecamatan Soreang direspons melalui pelayanan publik.

Anggota legislatif *incumbent* berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat (*input*), memperjuangkannya dalam forum politik (misalnya melalui penganggaran, pengawasan, atau penyusunan kebijakan), hingga akhirnya menghasilkan kebijakan atau program pelayanan publik (*output*) yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tindakan mereka juga akan mempengaruhi tingkat dukungan atau kepercayaan masyarakat terhadap sistem

²⁰ Ihsan Wira Senjaya, "Kebijakan Publik Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Batang : Analisis Teori David Easton," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 825–32.

politik secara keseluruhan, yang kemudian menjadi umpan balik (*feedback*) bagi keberlangsungan sistem itu sendiri.

Penggunaan teori ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji sejauh mana perilaku politik anggota legislatif *incumbent* merefleksikan respons terhadap aspirasi masyarakat dan pengaruhnya terhadap efektivitas serta pemerataan pelayanan publik di Kecamatan Soreang.

2. Teori Pilihan Rasional

a. Asumsi dasar teori pilihan Rasional

Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh Coleman dalam Nila Sastrawati, menekankan bahwa setiap tindakan individu didorong oleh tujuan tertentu, dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai-nilai atau preferensi yang dimiliki. Menurut Coleman, dalam Nila Sastrawati, 2019 diperlukan pemahaman yang tepat mengenai aktor rasional, yang konsepnya berasal dari ilmu ekonomi. Dalam pandangan ini, individu dianggap memilih tindakan yang mampu memberikan manfaat atau memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka secara maksimal.²¹

Teori Pilihan Rasional menurut Coleman dalam Amrin bahwa Inti dari teori pilihan rasional terletak pada anggapan bahwa setiap tindakan individu diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, di mana baik tujuan maupun tindakannya dipengaruhi oleh nilai atau preferensi yang dimilikinya.²² Fokus utama teori ini adalah pada individu sebagai aktor yang dipandang memiliki kehendak dan tujuan tertentu. Tujuan tersebut menjadi dasar bagi berbagai upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencapainya.

Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman menekankan bahwa individu bertindak berdasarkan kalkulasi rasional untuk

²¹Nila Sastrawati, "ECG, November 2019," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 167–296, <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2018.12.015>.

²²Amrin, "Legislatif Di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2014 Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negri Makassar (Uin) Alauddin" (Universitas Islam Negri Makassar (UIN) Alauddin, 2016).

mencapai tujuan tertentu sesuai preferensi, nilai, atau kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut sangat relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik.

Anggota legislatif *incumbent* dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam memberikan pelayanan publik tidak lepas dari pertimbangan rasional demi mempertahankan dukungan politik, citra di mata masyarakat, serta peluang untuk kembali terpilih di periode berikutnya. Pilihan-pilihan politik seperti memberikan bantuan sosial, memperbaiki infrastruktur, atau menjalankan program-program tertentu bisa dilihat sebagai bentuk strategi rasional yang disesuaikan dengan harapan konstituen di Kecamatan Soreang.

Interaksi dinamis antara faktor internal dan eksternal menjadi dasar yang memengaruhi perilaku politik mereka dalam melakukan perhitungan untung-rugi secara politis. Dari faktor internal, tindakan mereka digerakkan oleh motivasi personal, nilai ideologis partai, serta strategi rasional untuk mempertahankan kekuasaan dan posisi di dalam struktur politik. Sementara dari faktor eksternal, mereka harus merespons tekanan lingkungan luar seperti dinamika tuntutan konstituen, opini publik, pergeseran peta elektoral, hingga pengaruh kelompok penekan (*pressure groups*). Melalui kompromi kedua faktor ini, kebijakan yang mereka pilih dirancang agar dapat menguntungkan secara elektoral, menjaga loyalitas pemilih, serta menciptakan legitimasi. Teori ini membantu memahami bahwa pelayanan publik yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk pengabdian, tetapi juga sebagai bagian dari strategi untuk memenuhi kepentingan politik secara rasional demi menyelaraskan ambisi internal dengan realitas eksternal.

C. Kerangka Konseptual

1. Perilaku Politik

a. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah serangkaian tindakan atau respon individu terhadap suatu hal yang kemudian menjadi kebiasaan, dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini. Pada dasarnya, perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan individu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Hal ini tercermin dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan.

Definisi dari perilaku tentunya ada banyak para tokoh atau bahkan ahli yang mendefinisikan makna dari perilaku. Seperti yang diungkapkan oleh Notoatmodjo, dalam Khairuddin Tampubolon, bahwa Perilaku adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia, mencakup berbagai macam aktivitas seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, dan membaca. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia mencakup semua kegiatan atau aktivitas, baik yang dapat dilihat langsung maupun yang tidak terlihat oleh orang lain.²³

Ilmu psikologi memandang perilaku sebagai seluruh manifestasi kehidupan individu saat berinteraksi dengan lingkungan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, serta yang disadari maupun yang tidak disadari. Dalam proses interaksi ini, seseorang dapat menunjukkan berbagai macam perilaku. Terkait dengan belajar dan pendidikan, perilaku dapat mengalami perubahan, seperti dari buruk menjadi baik, dari tidak terampil menjadi terampil, dan dari tidak tahu menjadi tahu, serta perubahan lainnya.²⁴

Perilaku dapat dipahami secara lebih rasional sebagai respons dari organisme atau individu terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan luar. Respons ini terdiri dari dua jenis, yaitu bentuk pasif dan bentuk aktif. Respons

²³Khairuddin Tampubolon and Nunti Sibuea, "Peran Perilaku Guru Dalam Menciptakan Disiplin Siswa," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 2, no. 4 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i4.467.h.2>

²⁴Hani Hanifah, Susi Susanti, and Aris Setiawan Adji, "Perilaku Dan Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Tujuan Pembelajaran," *Manazhim* 2, no. 1 (2020): 105–17, <https://doi.org/10.36088/manazhim.v2i1.638.h.112>

pasif merupakan respons internal yang terjadi di dalam diri individu dan tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang lain. Di sisi lain, respons aktif adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung.²⁵

Mengenai adanya beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi perilaku itu sendiri di dalam ilmu psikologi ialah :

1) Faktor Biologis

Faktor ini menunjukkan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi psikologi sosial juga memiliki dampak signifikan terhadap perilaku individu. Contohnya, saat merawat anak, terdapat motif biologis lain yang turut mempengaruhi perilaku manusia.

2) Faktor Sosio psikologis

Faktor ini melibatkan komponen emosional yang muncul dari adanya aspek sosio psikologis pada individu. Komponen ini berkaitan dengan elemen kognitif serta aspek intelektual manusia, dan berpengaruh pada kebiasaan serta keinginan individu untuk melakukan berbagai tindakan.

3) Sikap

Sikap sangat mempengaruhi perilaku seseorang, mencakup tindakan, persepsi, dan cara berpikir individu yang merasa bahwa tindakan yang diambil berhubungan dengan situasi dan nilai-nilai yang diyakininya. Sikap juga dapat berfungsi sebagai pendorong motivasi bagi orang lain di sekitarnya, sehingga menciptakan pengalaman positif.

4) Faktor Emosi

Faktor ini berpengaruh pada perilaku seseorang, di mana emosi dapat mempengaruhi suasana hati dan segala aktivitas yang dilakukan. Emosi juga mengubah persepsi terhadap rangsangan yang diterima oleh indra. Intensitas emosi bervariasi, bisa ringan hingga sangat kuat. Emosi dapat meningkatkan

²⁵Pengertian dan Istilah, "Pengertian Perilaku Dan Ruang Lingkupnya," Kumparan, 2023.

perhatian terhadap hal-hal yang menegangkan, berhubungan dengan rangsangan fisiologis, detak jantung yang meningkat, serta tekanan darah yang lebih tinggi.

5) Komponen Kognitif

Faktor ini berhubungan dengan kepercayaan individu, dimana komponen kognitif dalam sikap mencakup keyakinan yang ada dalam diri seseorang. Kepercayaan ini dapat mempengaruhi perspektif individu dalam menentukan sikap terhadap orang lain di sekitarnya.²⁶

Menganalisis berbagai perilaku dari sudut pandang yang ada diatas, kita dapat lebih efektif dalam memahami tindakan manusia serta merancang intervensi yang tepat dalam pendidikan, psikologi, dan bidang lainnya.

b. Pengertian Politik

Politik merupakan suatu proses pengambilan keputusan di dalam kelompok, organisasi, atau negara yang melibatkan berbagai kepentingan, nilai, dan ideologi. Dalam pandangan yang lebih luas, politik mencakup pengelolaan kekuasaan dan otoritas, serta cara masyarakat mengatur hubungan diantara anggotanya. Proses politik dapat berlangsung pada berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga internasional, dan melibatkan beragam aktor, seperti pemerintah, partai politik, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Selain itu, politik juga seringkali menyangkut perdebatan mengenai kebijakan publik, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Adapun definisi politik menurut J.Barents dalam Susi Fitria Dewi, bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara dan tugas-tugasnya yang merupakan bagian dari masyarakat.²⁷

Ilmu sosiologi, memahami politik sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi sosial dalam pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, dan pengelolaan sumber daya di masyarakat. Para sosiolog berpendapat bahwa politik

²⁶Tampubolon and Sibuea, "Peran Perilaku Guru Dalam Menciptakan Disiplin Siswa."h.3

²⁷susi fitria Dewi, "Sosiologi Politik," Gre publishing, 2017.h.5

tidak hanya terfokus pada lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup hubungan antara individu dan kelompok dalam berbagai konteks sosial.

2. *Incumbent*

a. Pengertian *Incumbent*

Incumbent adalah calon legislatif yang saat ini menjabat sebagai anggota legislatif pada periode sebelumnya dan berencana untuk mencalonkan diri lagi pada periode mendatang.²⁸ Istilah "*incumbent*" berasal dari bahasa Latin "*incumbere*," yang berarti "untuk berbaring di atas" atau "memegang posisi." Dalam konteks politik dan organisasi, istilah ini digunakan untuk merujuk pada individu atau kelompok yang saat ini memegang suatu jabatan atau posisi, terutama ketika mereka mencalonkan diri lagi untuk mempertahankan posisi tersebut. Dalam perkembangan bahasa, "*incumbent*" telah menjadi istilah umum dalam politik untuk menggambarkan pejabat yang sedang menjabat. Para anggota legislatif yang ingin mencalon untuk maju kembali menjadi anggota legislatif dalam hal ini (*incumbent*) biasanya para anggota legislatif ini lebih memiliki peluang mendapatkan suara yang lebih banyak dibandingkan dengan caleg yang baru ingin maju menjadi anggota legislatif. Hal ini tentunya dikarenakan *incumbent* lebih telah dikenal luas oleh masyarakat. Tentunya masyarakat dapat menilai kinerja yang telah dilakukan caleg yang sebelumnya.

Perspektif sosiologi, *incumbent* mengacu pada individu atau kelompok yang saat ini memegang posisi atau jabatan dalam suatu organisasi, lembaga, atau pemerintahan. Dalam konteks politik, istilah ini umumnya merujuk pada pejabat yang sedang menjabat dan berupaya mempertahankan posisinya dalam pemilihan umum. Mereka sering kali memiliki keunggulan tertentu, seperti pengalaman, akses ke sumber daya, dan pengenalan di kalangan pemilih.

3. Pelayanan publik

²⁸ Nasiruddin, "Strategi *Incumbent* Dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Maros."h.194

a. Pengertian Pelayanan

Sinabela dalam Nurhadi dalam istilah Nurhadi "pelayanan" berasal dari kata "layan," yang berarti menolong dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain untuk melakukan tindakan melayani. Pada dasarnya, setiap manusia memerlukan pelayanan, bahkan bisa dikatakan bahwa pelayanan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.²⁹ Definisi lain menyebutkan menurut Hasibuan, dalam Nurhadi, bahwa pelayanan atau *service* adalah setiap aktivitas atau manfaat yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas suatu benda, serta produksinya bisa terkait atau tidak dengan produk fisik.³⁰

Secara spesifik, pelayanan dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1) Pelayanan Lisan

Pelayanan lisan dilakukan oleh petugas yang berinteraksi dengan masyarakat, seperti di bidang humas, layanan informasi, dan bidang lain yang bertugas memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapa pun yang memerlukan.

2) Pelayanan Tertulis

Pelayanan tertulis merupakan bentuk layanan yang paling mencolok dalam pelaksanaan tugas, baik dari segi jumlah maupun perannya.

3) Pelayanan dalam Bentuk Perbuatan

Umumnya, layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas tingkat menengah dan bawah sebanyak 70-80%. Oleh karena itu, keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat mempengaruhi hasil dari tindakan atau pekerjaan yang dilakukan.³¹

²⁹Nurhadi, "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2018): 137–50.hal.139

³⁰Nurhadi.h.140

³¹Nurhadi.h.140

Ilmu sosiologi berpandangan bahwa, pelayanan bukan hanya sekedar aktivitas yang dilakukan, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang kompleks yang mencerminkan interaksi, struktur, dan nilai-nilai dalam masyarakat.

b. Pengertian Publik

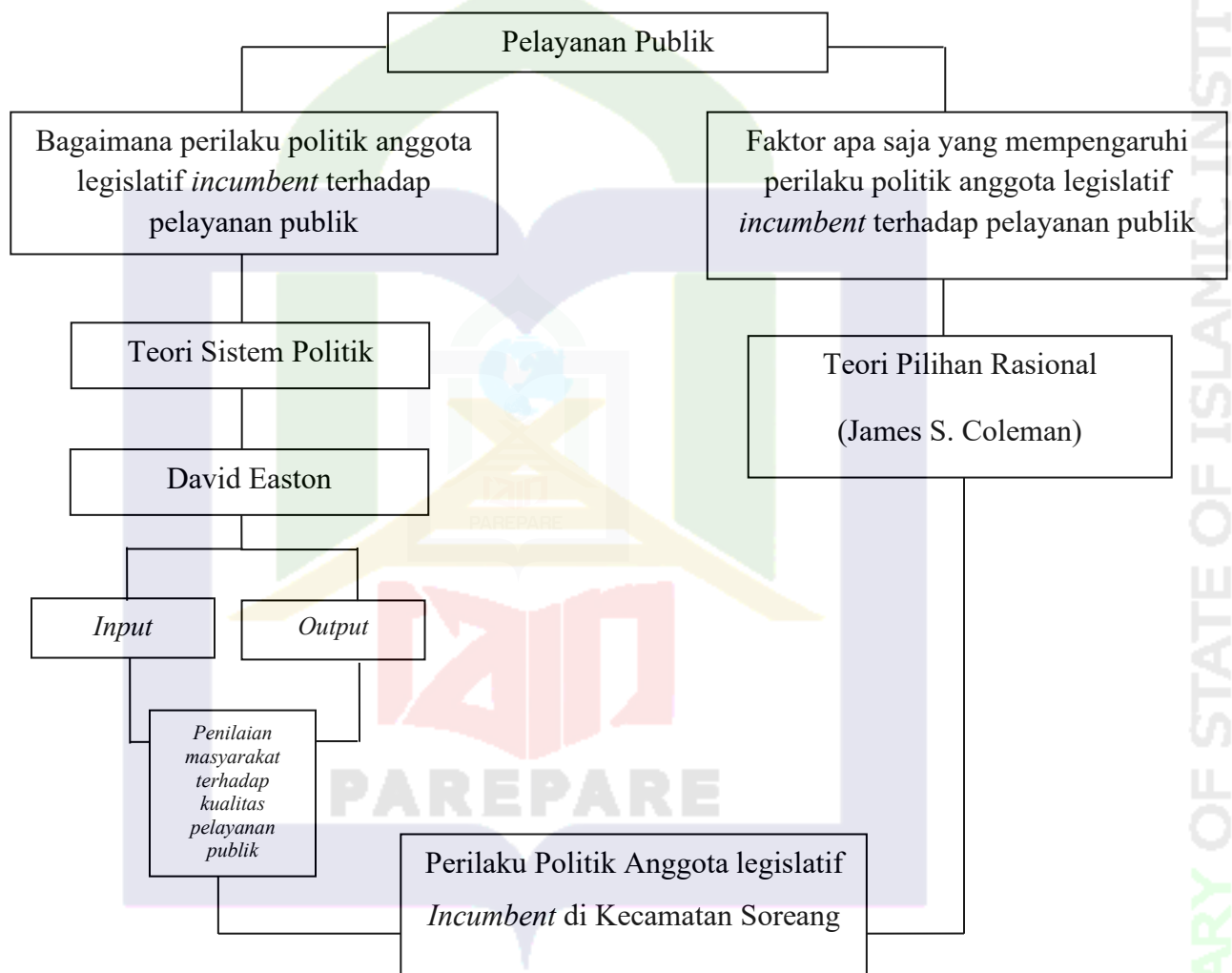
Definisi "publik" juga dapat merujuk pada sekelompok individu yang memiliki kepentingan atau tujuan bersama dalam suatu komunitas. Dalam konteks ini, publik terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial dan memiliki kesamaan dalam nilai, norma, serta aspirasi. Pembentukan publik sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti geografi, minat, atau isu-isu yang dihadapi, dan dapat mencakup komunitas lokal, kelompok profesional, atau bahkan populasi yang lebih besar yang terpengaruh oleh masalah tertentu.

Selain itu, publik juga dapat dilihat sebagai entitas yang beroperasi dalam bidang politik dan sosial. Dalam konteks ini, publik berfungsi sebagai sumber kekuatan demokrasi yang berkontribusi pada pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, serta menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik dengan cara yang adil dan transparan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir pada dasarnya merupakan landasan penelitian yang mengintegrasikan teori, observasi, fakta, dan tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Dengan demikian, kerangka berpikir disusun untuk menjelaskan dan memaparkan konsep-konsep yang relevan dalam penelitian. Kerangka berpikir juga bisa dipandang sebagai gambaran dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan antar elemen yang saling terkait. Dengan demikian, kerangka berpikir berfungsi sebagai alur logis yang mengarahkan jalannya penelitian. Selain itu, kerangka acuan ilmiah juga dapat terdiri dari titik-

titik yang berhubungan dengan variabel-variabel yang relevan.³² Kerangka pikir umumnya disajikan dalam bentuk diagram atau skema, bertujuan untuk memberikan cara yang lebih jelas dan efisien dalam menjelaskan serta memahami hubungan antar bagian-bagian yang ada. Tentunya berdasarkan pada penjelasan yang ada diatas , peneliti mengembangkan kerangka pikir sebagai berikut



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

³²Arif Mukti Ramadhan, “Pengertian Dan Macam-Macam Kerangka Berpikir Penelitian,” ebizmark blog, 2023.

Perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* dalam penelitian ini akan berfokus pada dengan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang serta rumusan yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik

Rumusan masalah pertama akan mengkaji Perilaku Politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat terkhusus yang ada di kecamatan Soreang penelitian ini akan mengkaitkan teori Sistem Politik dengan Perilaku politik anggota legislatif *incumbent* . Teori Sistem Politik akan dikaitkan dengan Perilaku Politik anggota legislatif *Incumbent* di kecamatan Soreang dalam melihat apa saja bentuk bentuk perilaku politik yang diberikan untuk peningkatan pelayanan publik dengan metode *Input* dan *Output* menurut Easton.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Politik anggota legislatif *Incumbent* pada pelayanan publik akan dikaji melalui teori pilihan rasional, alasanya, mengungkap apakah anggota legislatif di Kecamatan Soreang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik atau masih ada kendala dalam tata kelola pemerintahan yang harus diperbaiki. Apabila faktor-faktor tersebut menguat , akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kepastian hukum, maka hal ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap kualitas dan peningkatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Teori yang telah digabungkan untuk mengkaji kedua objek permasalahan , kemudian akan menemukan hasil penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana Perilaku Politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih dikarenakan berfokus di satu lokasi tertentu yaitu di area kecamatan Soreang , dan bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan rinci mengenai perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus , peneliti dapat menggali beberapa aspek respons yang diwawancara , memahami langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik , dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana perilaku politik serta faktor faktor apa yang mempengaruhi anggota legislatif *incumbent* agar dapat terelisasikan di dalam pelayanan publik

Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dan wawancara mendalam, observasi, partisipatif, dan analisis dokumen mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan Anggota Legislatif yang bersedia dan beberapa masyarakat di kecamatan Soreang akan memberikan pandangan langsung mengenai pengalaman mereka, persepsi, respon dan tantangan yang dihadapi. Observasi partisipatif akan membantu peneliti memahami perilaku politik anggota legislatif dan respons yang didapatkan masyarakat Soreang dalam pelayanan publik. Analisis dokumen akan melengkapi data dari wawancara dan observasi dengan informan kontekstual yang lebih luas. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang, serta apa

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik bagi masyarakat Soreang .

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, dalam Pinton Setya Mustafa, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk menyelidiki objek yang berada dalam kondisi alami. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pemilihan sampel sumber data dilakukan dengan teknik purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (gabungan). Analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan hasil dari penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman makna dibandingkan dengan generalisasi.³³

Penelitian kualitatif dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perilaku politik sosial, yaitu perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik di kecamatan Soreang. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan bentuk perilaku, respons, persepsi dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam , yang tidak dapat diukur atau dievaluasi melalui metode kuantitatif.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian dilakukan baik dengan observasi atau mengumpulkan data sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan di dalam rumusan masalah di kecamatan Soreang , Kota Parepare. Kecamatan Soreang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, kecamatan ini terletak

³³ Pinton Setya Mustafa, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga* (Mojokerto: Inshigt meditama, 2022).

di pesisir barat Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian selatan Kota Parepare. Keberadaannya di tepi pantai memberi keuntungan dalam hal akses transportasi laut, selain jalur darat yang menghubungkan Soreang dengan pusat Kota Parepare serta daerah di sekitarnya. Posisi Soreang yang dekat dengan pelabuhan juga menjadikannya kawasan yang strategis, mendukung kegiatan perdagangan dan perekonomian setempat.

Penelitian ini juga tentunya akan memanfaatkan informan dari Anggota legislatif *Incumbent* di kecamatan Soreang dan tentunya masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik di kecamatan Soreang sebagai responden. Alasan dipilihnya lokasi Kecamatan Soreang dikarenakan letak Kecamatan Soreang yang dekat dengan jalur transportasi utama dan pusat kegiatan ekonomi menjadikannya sebagai wilayah yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di Kota Parepare. Kondisi ini memberikan konteks yang penting untuk memahami bagaimana perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik di kawasan yang sedang berkembang pesat.

2. Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah proposal diseminarkan dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Selain itu, bukti administratif juga menjadi salah satu persyaratan sebelum memulai proses penelitian, seperti surat izin dari kantor jurusan dan izin dari pemerintah setempat (lokasi penelitian). Penulis memperkirakan bahwa durasi penelitian akan berlangsung selama dua bulan, yang dimulai setelah proposal diseminarkan dan dinyatakan siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada masyarakat yang berada di kecamatan Soreang di beberapa kelurahan yang ada di perkampungan yang dipilih oleh peneliti di kecamatan Soreang serta informan dari anggota legislatif *Incumbent* yang bersedia

di kecamatan Soreang. Penulis akan melakukan analisis bagaimana perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik. Data yang dikumpulkan kemudian akan diolah dengan metode kualitatif, tujuannya agar dapat diketahui seperti apa bentuk perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik di kecamatan Soreang, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik.

D. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menetapkan fokus penelitian, menentukan jenis informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada. Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari informan yaitu beberapa daerah masyarakat di Kecamatan Soreang serta anggota legislatif *Incumbent* yang akan digali informasinya oleh peneliti.

Informasi dan data yang didapatkan kemudian diproses sedemikian rupa agar dapat disampaikan dengan jelas dan akurat, sehingga dapat dipahami oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya ;

1. Data primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Sumber data tersebut dicatat dalam bentuk catatan tertulis yang diambil melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti³⁴Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ir.H.kaharuddin Kadir,M.Si, Dra.Hj.Asmawati, Namri Nasir, Hj.Indriasari Husni, S.Kom, Andi Muh.Fudail, S.E,

³⁴ Moh Fakih, "Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Masa Pandemi," *UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI*, 2021, 1–27.h.27

Hj. Apriyani dan wawancara serta masyarakat yang mengalami hambatan dalam pelayanan publik yang didapatkan di kecamatan Soreang.

Keterbatasan dalam proses pengumpulan data menyebabkan penulis hanya dapat melakukan wawancara secara langsung dengan 3 dari 6 anggota legislatif yang telah disebutkan, yakni; Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si., Dra. Hj. Asmawati, Namri Nasir. Hal tersebut dikarenakan beberapa anggota legislatif seperti; Hj. Indriasari Husni, S.Kom., Andi Muh. Fudail, S.E., Hj. Apriyani, memiliki jadwal yang padat dan lebih banyak menjalankan aktivitas kerja di lapangan, sehingga cukup sulit untuk ditemui dalam waktu penelitian yang telah ditentukan. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian, kesesuaian jadwal antara peneliti dan informan, serta adanya agenda kedinasan dan kegiatan pelayanan masyarakat yang dijalankan oleh anggota legislatif juga menjadi faktor yang memengaruhi terbatasnya proses wawancara. Meskipun demikian, data yang diperoleh dari informan yang berhasil diwawancarai dinilai telah mampu memberikan informasi yang relevan dan mendukung kebutuhan penelitian terkait perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik.

2. Data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, surat kabar, dokumen pemerintah, atau majalah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari hasil artikel jurnal, internet, sosial media dan surat kabar.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini untuk mengumpulkan dan mengolah data di lapangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai data primer. Untuk menganalisis Perilaku Politik Anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik. Sehingga teknik pengumpulan serta pengolahan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan terhadap berbagai peristiwa atau gejala yang relevan dengan tujuan penelitian. Salah satu kelemahan dari metode ini adalah adanya data tertentu yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, seperti informasi pribadi yang bersifat rahasia. Selain itu, ada kecenderungan bagi individu yang sedang diamati untuk berperilaku atau bertindak sesuai dengan harapan pengamat. Meskipun demikian, kelebihan observasi terletak pada kemampuannya untuk memenuhi rasa ingin tahu peneliti, sehingga proses yang dilalui dapat memberikan makna atau nilai tersendiri.³⁵

Penelitian yang berjudul “Perilaku Politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik di kecamatan Soreang” salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Tujuan observasi adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian melalui perencanaan yang matang dan dokumentasi yang terstruktur secara sistematis. Dengan demikian, observasi dapat dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan data yang tepat untuk keperluan penelitian tentang perilaku politik anggota legislatif *Incumbent* terhadap pelayanan publik.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif memiliki perbedaan dengan jenis wawancara lainnya. Hal ini dapat dibandingkan dengan situasi ketika seseorang menyambut mahasiswa atau pegawai baru. Wawancara penelitian kualitatif dilaksanakan dengan tujuan tertentu dan cenderung menggunakan pertanyaan yang lebih santai serta tidak terlalu formal.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui teknik wawancara. Seluruh informan yang telah ditentukan diwawancarai dengan frekuensi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan penelitian dan keluasan informasi yang diperlukan pada setiap topik yang dikaji. Artinya, jika

³⁵Agus Nurul Rohmah Putri Frilly Natasya Rendy Raihan Rustamana, “Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif,” *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN* 5, no. 5 (2024): 1–10.h.4

wawancara dengan seorang informan mengenai suatu topik dianggap sudah memadai, maka wawancara tersebut dapat dihentikan. Namun, untuk masalah yang sama, wawancara dengan informan lain bisa dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.³⁶

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan *independent interview* (wawancara mendalam). Melalui wawancara mendalam peneliti dapat secara langsung bertukar informasi sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode penting untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang. Metode ini mencakup analisis terhadap tulisan dan elemen visual dalam berbagai dokumen, seperti buku, surat kabar, gambar, dan media visual lainnya.

Data dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh melalui foto-foto kegiatan wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, baik anggota legislatif *incumbent* maupun masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik.

F. Uji Keabsahan Data

Tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif menempatkan kredibilitas data sebagai aspek penting, yang ditunjukkan oleh kesesuaian antara laporan peneliti dan kondisi nyata yang terjadi pada objek penelitian.³⁷ Tentunya dalam kriteria uji keabsahan data inilah yang menjadi acuan atau tolak ukur untuk

³⁶ Sirajuddin Saleh, "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung," *Analisis Data Kualitatif* 1 (2017): 180.h.172

³⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102.h.147>

menemukan serta menarik kesimpulan dari sebuah data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Penerapan kepercayaan (*credibility*) pada dasarnya berfungsi sebagai pengganti konsep validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Kriteria kredibilitas berfokus pada penilaian apakah hasil penelitian kualitatif dapat dianggap kredibel atau dapat dipercaya dari sudut pandang partisipan yang terlibat. Hal ini karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari perspektif partisipan. Partisipan adalah pihak yang memiliki otoritas untuk menilai kredibilitas hasil penelitian tersebut. Untuk memastikan kredibilitas data yang dikumpulkan, ada berbagai teknik yang bisa digunakan.³⁸

Keabsahan yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam aktivitas penelitian di lapangan.
- b. Melakukan pengamatan secara terus-menerus untuk memperoleh data yang lebih mendalam.
- c. Menggunakan teknik triangulasi, baik dari segi sumber maupun data, untuk memverifikasi kebenaran data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber lain, sehingga dapat memperjelas pemahaman mengenai hubungan antar data.
- d. Melibatkan rekan sejawat teknik ini dilakukan dengan cara mempresentasikan hasil sementara atau hasil akhir penelitian dalam bentuk

³⁸M. Husnullail et al., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah,” *Journal Genta Mulia* 15, no. 0 (2024): 70–78.h.72

diskusi analitis dengan rekan-rekan sejawat. Pendekatan ini bertujuan untuk memeriksa keabsahan data sebagai salah satu metode verifikasi.³⁹

- e. Menggunakan referensi atau bahan lain seperti rekaman, catatan tertulis, salinan, dan sebagainya, untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap kebenaran data yang diperoleh.
- f. Melakukan *member check*, yaitu pengecekan terhadap hasil yang telah diperoleh untuk memastikan akurasi data, serta untuk memperbaiki atau menambah informasi yang salah atau kurang tepat dalam proses pengumpulan data.

Maleong dalam M. Husnullail mengemukakan empat jenis triangulasi untuk memeriksa keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, metode, antarpeleliti, dan teori.⁴⁰ Dimulai dari Triangulasi sumber merupakan jenis triangulasi pertama yang digunakan untuk menguji data dengan cara memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Proses pengecekan data melalui berbagai sumber atau informan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh melalui pendekatan atau teknik yang berbeda. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Triangulasi teori adalah hasil akhir dari penelitian kualitatif berupa rumusan informasi atau pernyataan tesis. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari adanya bias individual dari peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.⁴¹ Hasil yang diharapkan dari perbandingan ini adalah untuk menemukan kesamaan atau mengidentifikasi penyebab perbedaan yang ada.

³⁹Husnullail et al.h.75

⁴⁰Husnullail et al.h.73

⁴¹Husnullail et al.h.74

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah komponen penting dalam penelitian yang menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat berbeda-beda, bergantung pada pendekatan yang digunakan. Dengan demikian, berikut adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses dalam analisis data yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus data yang tidak relevan, serta mengorganisasi data agar kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang dikumpulkan akan disaring, diringkas, dan difokuskan pada aspek-aspek utama yang penting.⁴² Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi. Dan untuk tahap selanjutnya peneliti melakukan pengelompokkan sekaligus menganalisa jawaban informan, jawaban yang sama dengan cara mengambil dan mencatat setiap informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan tema penelitian.

2. Display Data

Penyajian data menjadi tahapan lanjutan setelah reduksi data dalam penelitian deskriptif kualitatif, yang dapat dilakukan melalui deskripsi singkat, diagram, atau hubungan antar kategori. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang terjadi, serta merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.⁴³ Penyajian analisis data (data display) merupakan langkah yang penting dalam menghasilkan kesimpulan kualitatif yang dapat diverifikasi dan

⁴²Rustamana, "Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif."h.5

⁴³Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Quanta* 2, no. 2 (2018): 83–91.h. 88

direplikasi. Dalam penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk teks yang biasanya bersifat naratif.

3. Verifikasi

Proses verifikasi data dilakukan setelah data diolah dan disesuaikan dengan pola pemecahan masalah yang telah ditentukan, guna memastikan ketepatan dan konsistensi hasil penelitian..⁴⁴ Dengan melakukan verifikasi, kesimpulan penelitian akan menjadi lebih dapat dipercaya dan dianggap sebagai jawaban yang sah terhadap masalah penelitian yang telah dianalisis.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian. Pelaksanaannya mengikuti setiap langkah analisis secara berulang, sehingga kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara terpadu.⁴⁵ Selanjutnya, tahap ini menghasilkan kesimpulan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai hasil penelitian.

⁴⁴Rustamana, "Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif."h.5

⁴⁵Saleh, "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung."h.174

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik

a. Perilaku Representatif dan Responsif

Analisis mengenai perilaku politik anggota legislatif dari perspektif representasi dan responsivitas diperlukan guna menjelaskan bagaimana peran mereka dijalankan dalam pelayanan publik di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Perilaku representatif dan responsif mencerminkan sejauh mana *incumbent* mampu hadir sebagai wakil rakyat yang peka terhadap kebutuhan masyarakat serta cepat merespons berbagai persoalan publik yang muncul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola perilaku ini menjadi indikator utama kualitas hubungan antara legislator dan konstituen, karena dari sinilah terlihat bentuk keterlibatan, komunikasi, dan keseriusan *incumbent* dalam memenuhi harapan warga.

Kalau bicara soal masalah di daerah sini, salah satu yang paling mencolok adalah keberadaan bangunan kosong di dekat sini. Bangunan itu sudah bertahun-tahun telantar dan sama sekali tidak pernah digunakan. Untungnya, kadang-kadang masih ada mahasiswa yang memanfaatkannya untuk kegiatan mereka, jadi tidak sepenuhnya mati.

Agus Asbar mengungkapkan responnya terhadap terhadap anggota legislatif *incumbent*, sebagai berikut :

“Menurut saya, masalah ini harus segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kita perlu mempertanyakan kembali, apa sebenarnya tujuan dan manfaat awal dari pembangunan gedung kosong yang dibangun di daerah sini? Seingat saya, bangunan itu dibangun di masa pemerintahan *incumbent* (pejabat terdahulu). Saya sendiri sudah menyampaikan keluhan ini secara langsung, terutama mempertanyakan asas manfaatnya ke anggota *incumbent* tersebut pada saat Reses namun sampai sekarang anggota *incumbent* tersebut belum ada tindak

lanjutnya, karena sangat disayangkan bangunan tersebut sekarang dibiarkan kosong tanpa kejelasan.”⁴⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, hasil wawancara tersebut, perilaku representatif anggota legislatif *incumbent* terlihat dari adanya ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung melalui kegiatan reses, termasuk terkait pemanfaatan bangunan pemerintah yang terbengkalai. Namun, dari sisi responsif, masyarakat menilai masih terdapat kekurangan karena keluhan yang telah disampaikan belum diikuti dengan tindak lanjut yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi penyerapan aspirasi telah berjalan, respons terhadap permasalahan yang diangkat masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Dengan demikian, perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik dalam kasus ini cenderung lebih menonjol pada aspek representasi melalui penerimaan aspirasi, sementara aspek responsivitas masih perlu ditingkatkan agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Azis salah satu warga kecamatan Soreang memberikan informasi terkait kinerja anggota legislatif *incumbent*, sebagai berikut :

“Terkait dengan kita bicara mengenai *incumbent* berarti tingkat kinerjanya itu pasti masyarakat senang, artinya sekalipun saat ini yang namanya money politik itu ada tetapi masyarakat juga masih sadar siapa anggota legislatif yang memperhatikan mereka jadi seperti contoh kasus yang bisa saya jelaskan ke anda orang datang membawakan uang dalam jumlah besar, kemudian ada orang membawakan uang dalam jumlah lebih sedikit namun ia adalah *incumbent* ini datang dengan itu hampir pasti dia lebih memilih *incumbent* karena kinerjanya. kerjanya dan komunikasi politiknya mungkin terkait dengan pelayanan publik mereka itu rata rata punya pemilih pemilih fanatik yang merasa diperhatikan, mengapa mereka merasa diperhatikan misalnya ada masalah di lembaga maka itulah mereka langsung merespon.”⁴⁷

⁴⁶ Agus Asbar Masyarakat Kecamatan Soreang wawancara di Parepare, 25 November 2025

⁴⁷ Azis , Masyarakat Kecamatan Soreang Wawancara di Parepare , 15 Januari 2026

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut cenderung menilai anggota legislatif *incumbent* sebagai pihak yang lebih representatif dan responsif dalam pelayanan publik. Hal ini terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka, terutama karena dianggap benar-benar memperhatikan kebutuhan warga. Meskipun praktik politik uang masih ada, banyak masyarakat tetap memilih *incumbent* karena rekam jejak kerja dan komunikasi yang baik. Selain itu, adanya respon cepat ketika masyarakat menghadapi masalah membuat warga merasa didengar dan diperhatikan, sehingga muncul loyalitas atau dukungan yang kuat dari para pemilih.

Darma yang juga merupakan warga kecamatan Soreang mengungkapkan bahwa pelayanan publik di parepare memang sangat tanggap apabila ada keluhan yang disampaikan baik melalui Rt/Rw maupun masyarakat langsung saat ada Reses / Kunjungan Dapil/kunjungan dapil, sebagaimana ia jelaskan sebagai berikut :

“Mengenai hal seperti di rumah sakit apa bila ada aduan cepat tanggap anggota DPRD ini beliau langsung menghubungi pihak BPJS apabila ada terkendala mengenai di bidang kesehatan apalagi mengenai BPJS”⁴⁸

Warga Kecamatan Soreang, menilai bahwa pelayanan publik di Parepare cukup responsif, terutama ketika masyarakat menyampaikan keluhan melalui RT/R W maupun langsung dalam kegiatan Reses / Kunjungan Dapil. Ia menyoroti adanya hubungan yang baik antara masyarakat dan anggota legislatif *incumbent* , yang terlihat dari cepatnya tindak lanjut terhadap berbagai aduan yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa para *incumbent* berupaya menjaga kedekatan dengan warga serta memanfaatkan kegiatan Reses / Kunjungan Dapil sebagai sarana untuk menyerap dan menangani aspirasi masyarakat.

Penyampaian contoh konkret terkait pelayanan kesehatan, khususnya dalam menghadapi kendala yang berhubungan dengan BPJS, memberikan gambaran mengenai implementasi pelayanan publik yang dilakukan. Menurutnya, anggota

⁴⁸ Darma ,masyarakat Kecamatan Soreang Wawancara Di Kota Parepare , 26 November 2025

DPRD *incumbent* bersikap proaktif dengan langsung menghubungi pihak BPJS jika ada masalah yang dialami warga dalam akses layanan kesehatan. Respons cepat ini menandakan adanya peran aktif anggota legislatif *incumbent* dalam memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi, sehingga memperkuat persepsi positif terhadap perilaku politik mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Erwin selaku masyarakat menyatakan tanggapannya bahwa terkait keluhan masyarakat diberikan kemudahan menyampaikan keluhan dan diberikan tanggapan untuk ditindaklanjuti keluhannya, selengkapnya sebagai berikut :

“Biasanya kalau saat Reses / Kunjungan Dapil begitu gampang Ji masyarakat kayak sampaikan keluhannya begitu. Kalau, seperti Reses / Kunjungan Dapil yang saya ikuti kemarin, Kalau kemarin itu Pak Namri Nasir sempat Ji dilihat itu Lokasi yang ada disini karena dia bilang kemarin waktu nya Reses / Kunjungan Dapil bilang insyaallah eh tidak lama lagi saya turun ke lapangan lihat itu lokasi banjir yang sekarang kita keluhkan waktu Banjir, Dan ini Pak Namri ini ya, kita cerita nah. Karena waktunya saya ikut Reses / Kunjungan Dapil begitu dia penyampaianya dia sampaikan kepada RT RW di situ, bahwa catat itu di mana posisi letaknya itu keluhannya nanti kita datang di sana.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara, perilaku representatif anggota legislatif *incumbent* tercermin dari keterbukaan dan kedekatan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan Reses / Kunjungan Dapil, masyarakat diberikan kemudahan untuk menyampaikan keluhan secara langsung tanpa hambatan yang berarti. Pak Namri Nasir sebagai anggota legislatif hadir sebagai wakil masyarakat dengan mendengarkan secara aktif persoalan yang dihadapi warga, khususnya terkait masalah banjir. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, melibatkan RT dan RW, sehingga menunjukkan adanya upaya representasi yang sistematis terhadap kepentingan masyarakat di wilayah dapilnya.

Bentuk perilaku responsif dapat dilihat dari tindakan nyata yang dilakukan dalam menanggapi keluhan masyarakat. Pak Namri Nasir tidak hanya menerima aspirasi secara normatif, tetapi juga menjanjikan tindak lanjut dengan turun langsung ke

⁴⁹ Ewin Masyarakat kecamatan Soreang wawancara di Parepare, 28 November 2025

lapangan untuk melihat kondisi yang dikeluhkan. Komitmen untuk mencatat lokasi dan mendatangi langsung titik permasalahan menunjukkan sikap responsif terhadap kebutuhan publik. Hal ini menggambarkan bahwa perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik tidak sebatas pada penyerapan aspirasi menjelang pemilu, melainkan diwujudkan melalui respons nyata dan rencana tindakan yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.

Agus Asbar warga kecamatan Soreang mengungkapkan bahwa mengenai pelayanan publik yang ada sudah baik dan bagus tapi ada pengajuan Masyarakat belum dapat terpenuhi, selengkapnya sebagai berikut:

“Terbilang bagus mi di sini sekarang maksudnya mengenai pelayanan disini, Iya sudah sangat bagus pelayanannya, Tapi Ada pengajuannya masyarakat, belum sampai sekarang belum terpenuhi. Nah, kenapa sampai sekarang tidak dikonfirmasi ini keluhan masyarakat? Tapi setelah di konfirmasi ternyata ada alasannya dan masyarakat disini sudah cukup mengerti juga, bahwa dana yang ada di pemerintahan tidak mencukupi, untuk merealisasikan ini keluhan Masyarakat. Dan ini juga sudahmi juga coba di konfirmasikan ke Depnaker juga toh, Tapi begitu juga alasannya di Depnaker, Katanya tidak ada dana untuk bisa direalisasikan ini keluhanya sementara masyarakat, Jadi katanya untuk sementara ditampung dulu saja itu aspirasi masyarakat.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara, perilaku representatif anggota legislatif *incumbent* tercermin dari upaya menyalurkan dan mengomunikasikan aspirasi masyarakat kepada instansi terkait. Meskipun tidak seluruh pengajuan masyarakat dapat terpenuhi, aspirasi warga tetap diakomodasi dan disampaikan melalui jalur pemerintahan hingga ke instansi teknis seperti Depnaker. Hal ini menunjukkan bahwa anggota legislatif berperan sebagai wakil masyarakat dengan membawa kepentingan publik ke dalam proses birokrasi dan pengambilan keputusan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan struktural seperti anggaran.

Bentuk perilaku responsif dapat dilihat melalui pemberian klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait faktor-faktor yang menyebabkan keluhan tersebut belum dapat direalisasikan. Anggota legislatif *incumbent* tidak bersikap

⁵⁰ Agus Asbar Masyarakat kecamatan soreang wawancara di Parepare , 25 November 2025

pasif, tetapi melakukan konfirmasi ke pihak terkait dan kemudian menyampaikan kembali hasilnya kepada masyarakat secara terbuka. Respons ini membuat masyarakat memahami kondisi keterbatasan dana dan dapat menerima bahwa aspirasi mereka untuk sementara ditampung. Dengan demikian, perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa realisasi program, tetapi juga dari kemampuan merespons keluhan secara komunikatif, transparan, dan bertanggung jawab.

Namri Nasir anggota legislatif *incumbent* memberikan tanggapan terkait berbagai respon dari Masyarakat, selengkapnya sebagai berikut :

“Ya, itulah sebetulnya karena artinya kalau saya pribadi, Setiap saat saya turun, Setiap saya dibutuhkan saya turun. Karena kadang masyarakat itu beranggapan bahwa 'Ah, nanti mau pemilihan baru muncul lagi nih Pak Dewan'. Jadi itulah salah satu cara juga itu sebetulnya untuk ke masyarakat, artinya supaya dia merasa tidak apa namanya, tidak merasa dilupakan setelah dia terpilih. Nah, alhamdulillah selama ini saya tetap saya bermasyarakat, karena ke depannya nanti ini kita akan butuh ke masyarakat, ya harus kita tetap berbaur dengan masyarakat.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perilaku representatif Namri Nasir tercermin dari konsistensinya menjaga kedekatan dengan masyarakat sepanjang masa jabatan, bukan hanya saat menjelang pemilu. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap turun ke lapangan setiap kali dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik agar masyarakat tidak merasa dilupakan setelah proses pemilihan selesai. Sikap ini menunjukkan bahwa fungsi perwakilan dijalankan melalui kehadiran langsung, komunikasi yang berkelanjutan, serta pembauran sosial dengan konstituen. Sementara itu, perilaku responsif terlihat dari upayanya merespons persepsi negatif masyarakat dengan tindakan nyata, yaitu tetap aktif dalam kegiatan sosial dan pelayanan publik, sehingga membangun kepercayaan serta legitimasi politik secara berkelanjutan.

⁵¹ Namri Nasir Anggota legislatif *Incumbent* wawancara di kecamatan Soreang, 28 November 2025

Peran Namri Nasir sebagai anggota Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk aspek pelayanan publik. Dalam fungsi legislasi, ia berperan dalam pembahasan dan pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan administrasi publik. Dalam fungsi pengawasan, ia mengawasi kinerja pemerintah daerah, termasuk dinas-dinas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Sedangkan dalam fungsi penganggaran, ia turut membahas dan menyetujui alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, perilaku politiknya terhadap pelayanan publik tidak hanya diwujudkan melalui kedekatan sosial, tetapi juga melalui pelaksanaan tugas kelembagaan yang melekat pada posisinya di Komisi I.

Asmawati selaku anggota legislatif *incumbent* memberikan tanggapan terkait pengalamannya dalam berbagai pelayanan bantuan kepada masyarakat, selengkapny sebagai berikut :

“Pelayanan publik itu pada dasarnya untuk semua orang, tidak boleh ada perbedaan antara siapa yang memilih atau tidak memilih. Namun secara pribadi, tentu saya tetap merasa punya tanggung jawab lebih kepada masyarakat yang dulu memilih saya. Meskipun begitu, bukan berarti saya mengabaikan yang lain. Misalnya, walaupun daerah pemilihan saya di sini, banyak warga dari wilayah sebarang yang datang menyampaikan keluhan, seperti masalah BPJS. Saya tetap melayani mereka dengan baik, apalagi sebagian keluarga saya juga ada di wilayah tersebut. Jadi, meskipun mereka bukan pemilih saya, tidak mungkin saya abaikan jika mereka membutuhkan bantuan.”⁵²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perilaku representatif dan responsif anggota legislatif *incumbent* tercermin dalam cara Asmawati memaknai pelayanan publik sebagai hak seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, termasuk antara pemilih dan bukan pemilihnya. Meskipun ia mengakui memiliki

⁵² Asmawati Anggota legislatif *Incumbent* wawancara di kecamatan Soreang, 26 Februari 2026

tanggung jawab moral yang lebih dekat kepada konstituen yang pernah memilihnya, sikap tersebut tidak membuatnya menutup akses pelayanan bagi warga lain. Temuan ini memperlihatkan adanya orientasi representatif yang inklusif, karena ia tetap menerima, mendengar, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dari luar daerah pemilihannya, seperti persoalan BPJS. Dalam konteks ini, responsivitasnya tampak dari kesediaan untuk merespons kebutuhan masyarakat secara langsung, cepat, dan tanpa diskriminasi, sehingga pelayanan yang diberikan tidak semata berbasis kepentingan elektoral, melainkan juga pada rasa tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Peran Asmawati sebagai anggota DPRD Komisi II bidang perekonomian dan keuangan menunjukkan pentingnya fungsi representatif dan responsif anggota dewan dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pelayanan publik, terutama terkait jaminan sosial, pembiayaan publik, dan pengawasan anggaran daerah. Sikap Asmawati yang tetap melayani keluhan warga, termasuk terkait BPJS, sejalan dengan fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran terhadap program-program pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, perilaku tersebut mencerminkan pelaksanaan tugas DPRD Komisi 2 yang tidak hanya berfokus pada aspek administrasi perekonomian dan keuangan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan dan anggaran publik benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat secara adil, merata, dan responsif.

b. Perilaku Advokasi Kebijakan

Perilaku advokasi kebijakan pada anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik terlihat melalui upaya mereka menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah daerah melalui mekanisme formal kelembagaan. *Incumbent* memanfaatkan posisinya untuk menyampaikan pokok pikiran (pokir), mengusulkan anggaran, serta melakukan koordinasi lintas instansi demi mendorong perbaikan layanan di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan administrasi. Namun, efektivitas advokasi ini sangat dipengaruhi oleh dinamika

politik dan jaringan birokrasi yang dimiliki masing-masing legislator. Semakin kuat posisi politik *incumbent* , semakin besar peluang usulan masyarakat dapat diakomodasi ke dalam kebijakan dan program layanan publik. Dengan demikian, perilaku advokasi kebijakan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai bagaimana *incumbent* menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah.

Ketua DPRD Kota Parepare yakni Kaharuddin Kadir mengungkapkan informasi terkait advokasi kebijakan publik sebagai berikut ;

“Pendekatan terkait dengan kebijakan pelayanan publik itu tergantung kondisinya sekarang dengan kemajuan teknologi informasi tentu paradigmanya pasti juga berubah kalau dulu, kepentingan masyarakat terhadap pemerintah terutama kepentingan pelayanan dokumen-dokumen pemerintahan , dokumen-dokumen kependudukan , dokumen-dokumen terkait dengan ahli waris dll sebagainya, artinya semua dokumen yang dibutuhkan masyarakat kepada pemerintah , dulu dulu itu mengurusnya tentu rumit , dari rw,rt ke kelurahan , kelurahan ke dinas, sekarang dengan kemajuan teknologi informasi pemerintah juga harus menyesuaikan diri. Sekarang di parepare kita DPRD bersama pemerintah daerah , mendorong bagaimana memberi pelayanan kepada masyarakat itu semua cepat , kalau perlu sekarang kan sistemnya one stop service artinya masyarakat 1 kali saja masuk maka semua kepentingan kepentingan terkait dengan dokumenya itu harus terselesaikan makanya ada mall pelayanan publik, mau urus ktp, mau urus keterangan hilang, mau urus IMBnya semua ada disitu dan semua urusanya harus selesai satu pintu saja.”⁵³

Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, menunjukkan bahwa beliau melihat advokasi kebijakan publik dalam konteks pelayanan publik mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dulu, proses pengurusan dokumen-dokumen penting, seperti dokumen kependudukan atau surat ahli waris, membutuhkan prosedur yang panjang dan rumit, melibatkan berbagai instansi dari tingkat RT hingga kelurahan. Namun, dengan adanya teknologi, pemerintah dan DPRD Parepare berupaya untuk menyederhanakan proses tersebut melalui sistem pelayanan satu pintu atau one stop

⁵³ Kaharuddin Kadir Anggota legislatif *Incumbent* wawancara di kecamatan Soreang, 17 Februari 2026

service. Di Parepare, penerapan sistem ini diwakili oleh Mall Pelayanan Publik yang memfasilitasi masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan administrasi dalam satu tempat dan dengan proses yang lebih cepat.

Hasil wawancara ini berhubungan erat dengan tugas pokok ketua DPRD yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD dalam hal pelayanan publik. Sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Perda dan kebijakan pemerintah kota, DPRD Parepare berperan aktif dalam mendorong perubahan dan inovasi dalam sistem pelayanan publik, termasuk memfasilitasi kemajuan teknologi yang menyederhanakan birokrasi. Fungsi legislasi DPRD juga berkontribusi pada penyusunan regulasi yang mendukung implementasi sistem one stop service ini, sementara fungsi anggaran memastikan bahwa anggaran yang diperlukan untuk mendukung infrastruktur pelayanan publik dapat dipenuhi. Dengan demikian, advokasi kebijakan pelayanan publik yang diungkapkan oleh Kaharuddin Kadir mencerminkan peran DPRD dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang efisien, transparan, dan mudah diakses.

Erma mengungkapkan bahwa apabila ikut dalam kegiatan Reses / Kunjungan Dapil yang diadakan anggota legislatif apabila ada keluhan yang disampaikan, anggota legislatif ini dapat langsung memberikan, Solusi untuk masalah keluhan yang di keluhkan dan komunikasinya bagus, selengkapnya sebagai berikut :

"Kalau warga disini , kalau ada keluhannya ya langsung dia bicara sama dia semisal kalau ada pertemuan, langsung dia melaporkan,Misalnya, Langsung dia kasih solusi, kalau ada ditanyakan sama dia. 'Eh Pak kenapa Pak ee belum pi ada lampu jalan,belum pi anu dia pasang lampu jalan di sini.Nanti itu nah telepon anunya ya, instansinya yang ini.'"⁵⁴

Pandangan Faosiah sebagai warga Kecamatan Soreang menunjukkan bahwa kegiatan reses atau kunjungan daerah pemilihan menjadi media yang penting bagi

⁵⁴ Erma Masyarakat kecamatan Soreang wawancara di Parepare, 2 Desember 2025

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif. Informasi lengkapnya sebagai berikut:

“Pada saat reses anggota legislatif ini menyerap aspirasi masyarakat dengan aspirasi masyarakat yang telah diserap hal ini yang menjadi acuan program mereka seperti halnya masyarakat kita, BPJS mereka ada yang tidak aktif, dan seperti daerah ini jalanannya perlu diperbaiki, anak-anak daerah ini perlu beasiswa, artinya semua yang menjadi keluhan masyarakat di keluarkan.”⁵⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perilaku advokasi kebijakan oleh anggota legislatif di Kecamatan Soreang terlihat cukup aktif dan dekat dengan masyarakat. Saat kegiatan reses atau kunjungan dapil, warga diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan secara langsung, dan anggota legislatif juga cepat merespons dengan memberikan solusi. Bahkan, ketika ada masalah seperti lampu jalan yang belum terpasang, mereka langsung menindaklanjuti dengan menghubungi instansi terkait. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih mudah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan perhatian.

Pelaksanaan kegiatan reses menjadi instrumen penting dalam proses penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan program. Aspirasi yang disampaikan mencakup berbagai isu, seperti BPJS yang tidak aktif, perbaikan jalan, dan kebutuhan beasiswa pendidikan bagi anak-anak. Dengan demikian, advokasi kebijakan yang dilakukan tidak hanya berhenti pada mendengar keluhan, tetapi juga berusaha menerjemahkannya menjadi program nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, perilaku advokasi kebijakan anggota legislatif *incumbent* dalam pelayanan publik terlihat dari kemampuan mereka memberikan respons cepat dan solusi langsung terhadap keluhan masyarakat, khususnya pada saat kegiatan Reses / Kunjungan Dapil. Erma menilai bahwa ketika warga menyampaikan permasalahan dalam pertemuan, anggota legislatif bersikap terbuka,

⁵⁵ Faosiah Masyarakat kecamatan soreang wawancara di Kota Parepare, 15 Januari 2026

komunikatif, dan segera menanggapi keluhan yang disampaikan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk mendengar dan merespons aspirasi masyarakat secara langsung.

Perilaku advokasi kebijakan tersebut juga tercermin dari tindakan konkret anggota legislatif dalam mengkoordinasikan permasalahan warga dengan instansi terkait. Ketika masyarakat mempertanyakan belum tersedianya fasilitas seperti lampu jalan, anggota legislatif langsung menghubungi pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Perilaku ini menunjukkan bahwa anggota legislatif *incumbent* tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga berperan aktif sebagai penghubung dan pendorong realisasi pelayanan publik melalui komunikasi dan koordinasi kebijakan yang efektif.

Imam selaku Masyarakat di Kecamatan Soreang memberikan tanggapan terkait perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik sangat terbuka, selengkapnya sebagai berikut :

“Kalau untuk mengenai pelayanan menurut saya itu sudah sangat baik apalagi kalau sekarang enak, itumi kubilang sekarang kalau di Parepare itu paling enak itu di Parepare pengurusan tidak ada susah, Cuma dari pelayanannya ji itu beda-beda sebagian besar bagus ada juga kurang bagus”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara, perilaku advokasi dan kebijakan anggota legislatif *incumbent* dalam pelayanan publik dinilai cukup baik dan terbuka oleh masyarakat. Imam menyampaikan bahwa proses pelayanan publik di Kota Parepare pada umumnya sudah berjalan dengan mudah dan tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat merasa terbantu dalam mengurus berbagai keperluan. Kondisi ini menunjukkan adanya peran anggota legislatif *incumbent* dalam mendorong kebijakan pelayanan publik yang lebih ramah dan memudahkan masyarakat.

Imam mengungkapkan, bahwa kualitas pelayanan publik masih belum sepenuhnya merata, karena terdapat perbedaan kualitas pelayanan di beberapa

⁵⁶ Imam, masyarakat kecamatan Soreang wawancara di Kota Parepare ,28 November 2025

sektor, di mana sebagian sudah baik dan sebagian lainnya masih kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dalam advokasi kebijakan masih diperlukan untuk terus mengawal, mengawasi, dan mendorong perbaikan pelayanan publik agar kualitasnya lebih merata dan sesuai dengan harapan masyarakat di Kecamatan Soreang.

Namri Nasir mengungkapkan dalam wawancara bahwa akan membenahi aturan-aturan agar sesuai dengan regulasi yang ada ,selengkapny sebagai berikut :

“Ke depannya kami mau lebih membenahi aturan-aturan yang ada. Karena aturan-aturan yang ada sekarang itu cukup ada apa, regulasi yang diikuti tetapi pelaksanaannya yang belum betul-betul diluruskan. Nah, inilah kami sebetulnya kami mau apa namanya, di Musrenbang nantinya kami mau luruskan itu, semua pendataan-pendataan itu kami akan ceklis kembali, mengkombinasikan dengan data dari sosial, termasuk di BKKBN. Karena sebetulnya data yang valid sebetulnya itu di BKKBN. Iya, dari lansianya, dari apa, masyarakat yang kena stunting-nya. Sebetulnya di situ data-data yang lengkap sebetulnya di situ. Untuk itu kami sebetulnya teman-teman di DPR sebetulnya itu kita mau serius untuk memberikan hak-haknya kepada masyarakat sepenuhnya untuk ke masyarakat. Supaya lebih apa namanya, lebih baik, iya. Sebagai fungsi, fungsi pengawasan kami di DPR terkait ke masyarakat.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara, perilaku advokasi kebijakan yang ditunjukkan oleh Namri Nasir sebagai anggota legislatif *incumbent* tercermin dari komitmennya untuk membenahi dan meluruskan pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ia menilai bahwa secara normatif aturan dan kebijakan telah tersedia, namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi, khususnya pada aspek pendataan masyarakat penerima layanan. Melalui forum Musrenbang, Namri Nasir mendorong pengecekan ulang serta pengintegrasian data dari berbagai instansi, seperti Dinas Sosial dan BKKBN, guna memastikan pelayanan publik, termasuk bagi lansia dan masyarakat terdampak stunting lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

⁵⁷ Namri Nasir Anggota legislatif *Incumbent* wawancara di kecamatan Soreang, 28 November 2025

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare pada Komisi I bidang hukum dan pemerintahan mencakup fungsi pengawasan, penganggaran, serta pembentukan peraturan daerah. Dalam konteks pelayanan publik, ia berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah agar sesuai dengan ketentuan hukum serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Perilaku politik *incumbent* yang ditunjukkan terlihat dari keseriusannya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, memastikan akurasi data sebagai dasar kebijakan, serta mengawal pelaksanaan pelayanan publik agar berjalan lebih efektif, transparan, dan tidak merugikan warga.

c. Perilaku Komunikatif dan Persuasif

Perilaku komunikatif dan persuasif menjadi salah satu dimensi penting dalam melihat bagaimana perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, seperti kegiatan Reses / Kunjungan Dapil, kunjungan lapangan, maupun komunikasi informal, anggota legislatif *incumbent* berupaya menyerap aspirasi, menyampaikan informasi kebijakan, serta membangun kepercayaan publik. Kemampuan berkomunikasi secara terbuka dan persuasif juga digunakan untuk meyakinkan masyarakat dan pihak terkait mengenai program maupun kebijakan yang diusulkan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan demikian, perilaku komunikatif dan persuasif *incumbent* menjadi faktor penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

St. Nurhayati mengungkapkan informasi mengenai kemudahan berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif *incumbent*, informasi lengkapnya sebagai berikut:

“Untuk komunikasinya sangat bagus dan sangat enjoy serta mudah di terima, menurut saya mereka itu sangat aktif. Mengenai tanggapan bahwa mereka hanya

aktif saat menjelang pemilu itu tidak benar, karena saya merasa memang kami diperhatikan. Untuk perubahan yang bisa saya liat itu seperti perbaikan perbaikan jalan yang sudah kita usulkan sudah bagus.”⁵⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Marham Hakim, sebagai berikut;

“Menurut saya aktif terus tidak hanya pas menjelang pemilu saja tap seperti jika ada kasus masyarakat yang mengalami berduka, atau seperti halnya ada undangan pernikahan terkadang mereka datang apabila tidak sibuk. Perubahan di daerah saya ini sudah ada perbaikan jalan pada saat masa jabatannya dan juga ada beberapa rumah disini mendapat program bedah rumah termasuk rumah saya ini, dan sudah disurvei tinggal menunggu bahanya.”⁵⁹

Erwin juga mengungkapkan pendapatnya bahwa ia merasa untuk respon dan untuk menyampaikan keluhan merasa sangat mudah untuk disampaikan apalagi dengan adanya momentum kegiatan Reses / Kunjungan Dapil yang diadakan, selengkapanya sebagai berikut :

“Biasa Reses / Kunjungan Dapil begitu masyarakat mudah menyampaikan keluhannya begitu.. kalau Reses / Kunjungan Dapil yang saya ikuti kemarin, tetap kita dikasih peluang untuk bertanya, Apa keluhannya masyarakat, untuk di sini apa yang mau diperbaiki, begitu. Namri Nasir yang saya ikuti. Karena itu saya ikuti kemarin.”⁶⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota legislatif di Kecamatan Soreang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mudah diterima oleh masyarakat. Warga merasa nyaman saat berinteraksi karena cara penyampaiannya santai, terbuka, dan tidak kaku. Mereka juga dinilai aktif dalam menjaga komunikasi, tidak hanya saat menjelang pemilu, tetapi juga di waktu lainnya. Hal ini membuat masyarakat merasa benar-benar diperhatikan, apalagi ketika usulan seperti perbaikan jalan dapat terealisasi dengan baik.

⁵⁸ St. Nurhayati Masyarakat kecamatan soreang wawancara di Kota Parepare, 16 Februari 2026

⁵⁹ Marham Hakim Masyarakat kecamatan soreang wawancara di Kota Parepare, 16 Februari 2026

⁶⁰ Ewin Masyarakat kecamatan soreang wawancara di Kota Parepare, 28 November 2025

Aspek persuasif dalam perilaku politik anggota legislatif terlihat dari kemampuannya menjalin hubungan yang dekat dengan masyarakat melalui kegiatan reses dan kunjungan daerah pemilihan sebagai sarana komunikasi politik. Dalam kegiatan tersebut, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan pendapat secara langsung. Proses ini berjalan dengan mudah dan terbuka, sehingga masyarakat merasa didengar dan dihargai. Pendekatan seperti ini membuat masyarakat lebih percaya dan terdorong untuk aktif menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik.

Darma dalam wawancaranya menjelaskan pendapatnya bahwa untuk komunikasi anggota legislatif *Incumbent* ini sangat bagus komunikasinya dan juga terkadang Masyarakat dapat secara langsung memberikan keluhannya saat anggota legislatif *Incumbent* ini turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, selengkapnya sebagai berikut:

“Bagus sekali komunikasinya. cuma itu tadi, tentu ada kendalanya kalau dia bilang kayak pokok-pokok pikiran, ya kita juga mengerti sekarang kan memang efisiensi anggaran. Dan juga biasanya masyarakat langsung ke anggota DPR-nya masing-masing kalau ada keluhan.”⁶¹

Arsyad Adam yang juga merupakan masyarakat kecamatan Soreang juga mengungkapkan hal serupa, sebagai berikut:

“Menurut saya, anggota legislatif ini cukup aktif karena mereka sering menemui masyarakat apabila ada keluhan dan komunikasinya sangat bagus kepada masyarakat. Pekerjaan anggota legislatif *incumbent* ini tergolong baik, namun saya memiliki saran agar harapannya mereka dapat lebih sering lagi melihat kondisi yang ada di masyarakat.”⁶²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota legislatif di Kecamatan Soreang memiliki komunikasi yang cukup baik dan terbuka dengan masyarakat. Warga merasa mudah menyampaikan keluhan secara langsung, terutama saat anggota

⁶¹ Darma Masyarakat Kecamatan Soreang wawancara di Kota Parepare , 26 November 2025

⁶² Arsyad Adam Masyarakat Kecamatan Soreang wawancara di Kota Parepare , 15 Januari 2026

legislatif turun ke lapangan untuk mendengar aspirasi. Hubungan komunikasi ini berjalan dua arah, di mana masyarakat juga memahami adanya keterbatasan seperti efisiensi anggaran, sehingga tidak semua aspirasi bisa langsung direalisasikan.

Perilaku persuasif anggota legislatif dinilai cukup baik, yang tercermin dari upayanya dalam menjalin kedekatan serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kehadiran mereka di tengah masyarakat membuat warga merasa diperhatikan dan lebih percaya untuk menyampaikan kebutuhan atau masalah yang ada. Meski begitu, masih ada harapan dari masyarakat agar anggota legislatif bisa lebih sering turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan, sehingga pelayanan publik bisa semakin baik dan merata.

Namri Nasir mengungkapkan dalam wawancara bahwa DPRD Adalah penyambung lidah rakyat yang dimana apabila rakyat tidak diperhatikan DPRD ada untuk menyampaikan suara rakyat ke rapat paripurna, selengkapnya sebagai berikut

"Intinya bahwa DPR ini adalah penyambung lidah rakyat apabila rakyat ini tidak diperhatikan. nah itulah fungsi kami di DPR, kami bersuara. Kami bersuara di DPR, di paripurna. Nah, kami ini DPR adalah representasi suara rakyat, penyambung lidah rakyat. Jadi, intinya bahwa DPR ini hadir untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat itu dirugikan."⁶³

Berdasarkan hasil wawancara, perilaku komunikatif dan persuasif yang ditunjukkan oleh Namri Nasir sebagai anggota legislatif *incumbent* tercermin dari perannya sebagai penyambung lidah rakyat. Ia menegaskan bahwa aspirasi dan keluhan masyarakat dikomunikasikan secara aktif melalui forum-forum resmi DPRD, khususnya dalam rapat paripurna. Sikap ini menunjukkan kemampuan komunikasi politik yang persuasif, di mana suara masyarakat tidak hanya disampaikan, tetapi juga diperjuangkan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, sehingga pelayanan publik tidak mengabaikan kepentingan warga.

⁶³ Namri Nasir Anggota legislatif *incumbent* wawancara di kecamatan Soreang , 28 November 2025

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare pada Komisi I bidang hukum dan pemerintahan mencakup fungsi representasi, pengawasan, dan pembentukan kebijakan daerah. Dalam konteks pelayanan publik, ia berperan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar tidak dirugikan oleh kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah. Perilaku politik *incumbent* yang ditunjukkan mencerminkan komitmen untuk melindungi kepentingan publik melalui komunikasi yang efektif dan persuasif, serta pengawasan kebijakan agar pelayanan publik berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* Terhadap Pelayanan Publik

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan salah satu aspek penting dalam memahami perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Faktor ini berkaitan dengan karakteristik personal dan kapasitas individu anggota legislatif, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman politik, integritas, komitmen terhadap kepentingan masyarakat, serta kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Faktor-faktor internal tersebut mempengaruhi cara anggota legislatif dalam merespons aspirasi warga, memperjuangkan kepentingan publik, serta menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Oleh karena itu, pengkajian faktor internal menjadi penting untuk menjelaskan sejauh mana perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terbentuk dari kesadaran, nilai, dan orientasi pribadi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Asmawati selaku Komisi II Perekonomian dan keuangan memberikan informasi terkait faktor internal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent*, selengkapnya sebagai berikut:

“Dari masa yang pertama dari awal saya terpilih kalau boleh saya bilang saya sambil belajar memahami sebenarnya apa yang harus saya lakukan untuk kepentingan konstituen. Saya selama saya duduk dan itu seiring berjalanya waktu memang saya dapat bahwa kalau konstituen atau masyarakat tidak punya anggota DPR atau kenalan susah untuk menyalurkan aspirasi, karna terus terang kita anggota DPR yang terpilih kalau kita reses atau turun ke masyarakat tentu menurut pendapat saya pribadi saya cari konstituen saya dulu, yang pilih saya dan saya akan wakikan suaranya yang dia percayakan ke saya tentu saya cari dulu dia. Mengenai pendekatan saya itu tentu saya akan selalu dekat dan supaya mereka juga yang pilih saya kemarin tidak canggung dan merasa memiliki kepercayaan penuh terhadap saya. Mengenai argumen tentang anggot legislatif hanya aktif ketika menjelang pemilu, pendapat saya pribadi merasa tidak seperti itu, karna di tim saya itu yang membantu saya kemarin setiap bulan adalah mereka, kita ketemu setiap bulan agar supaya semuanya merasa semangat. Untuk ketemunya saya buat arisan karena maklumlah saya punya tim itu mayoritas 70% perempuan dan selebihnya itu ialah laki laki. Kalau adapun laki laki pasti ada istrinya ikut dan saya akui kalau tim perempuan itu gampang dia dekat dengan calon-calon pemilih lainnya.”⁶⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif dalam pelayanan publik berkaitan dengan proses belajar, pengalaman, dan cara mereka membangun hubungan dengan masyarakat. Seiring waktu, anggota legislatif mulai memahami perannya sebagai wakil rakyat, terutama pentingnya menjangkau dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Pendekatan yang dilakukan cenderung berfokus pada orang-orang yang telah memberikan dukungan, karena dari situlah muncul rasa tanggung jawab untuk mewakili dan menjaga kepercayaan yang sudah diberikan.

Pembangunan kedekatan dengan masyarakat dilakukan melalui pola komunikasi yang berkesinambungan serta hubungan interpersonal yang lebih intens. Upaya seperti pertemuan berkala dengan tim dan kegiatan yang santai membuat hubungan menjadi lebih akrab dan tidak kaku. Strategi ini juga membantu memperluas jaringan dan mempermudah penyampaian aspirasi dari masyarakat. Dengan cara ini,

⁶⁴ Asmawati Anggota legislatif *Incumbent* wawancara di kecamatan Soreang, 26 Februari 2026

anggota legislatif tidak hanya menjaga loyalitas pendukung, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik.

Namri Nasir mengungkapkan bahwa motivasinya mencalonkan Kembali karena masih ada beberapa tugas-tugasnya belum terselesaikan di periode sebelumnya selengkapya sebagai berikut :

"Jadi motivasi saya kan dasarnya itu ya, mengabdikan kepada masyarakat. Karena selama satu periode saya rasa itu belum terpenuhi semua harapan yang kemarin masyarakat harapkan dari saya. Semoga di periode kedua ini bisa *ter-cover* semua permohonan-permohonan dan permintaan masyarakat."⁶⁵

Namri Nasir juga menambahkan bahwa alasan kedua yang menjadi motivasinya mencalonkan kembali yaitu karena pembangunan-pembangunan yang ada di Parepare harus dipertegas kembali aturan-aturannya selengkapya sebagai berikut:

"Alasan kedua termasuk pembangunan-pembangunan yang ada di Parepare itu perlu kita pertegas aturannya. Jadi sebagai anggota dewan fungsi *controlling* kami, sekaligus sebagai fungsi pengawasan. Belajar dari pengalaman saya ternyata selama periode pertama saya baru melihat kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan ini, ada yang perlu betul-betul dibenahi."⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara, faktor internal yang mempengaruhi perilaku politik Namri Nasir sebagai anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik terutama berasal dari motivasi personal dan komitmennya untuk mengabdikan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa keinginannya mencalonkan kembali didorong oleh kesadaran bahwa pada periode sebelumnya masih terdapat aspirasi dan permohonan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya orientasi pelayanan dan tanggung jawab moral dalam diri *incumbent* untuk memperbaiki kinerja serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara lebih optimal pada periode berikutnya.

⁶⁵ Namri Nasir Anggota legislatif *Incumbent* wawancara di Kecamatan Soreang, 28 November 2025

⁶⁶ Namri Nasir Anggota legislatif *incumbent* wawancara di Kecamatan Soreang, 28 November 2025

Namri Nasir juga mengungkapkan bahwa pengalaman selama periode pertama membentuk kesadaran internal mengenai pentingnya penguatan aturan dalam pembangunan di Kota Parepare. Motivasi tersebut mendorongnya untuk lebih serius menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemerintah. Adapun tugas pokok dan fungsi Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare di Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan diwujudkan melalui fungsi pengawasan, pengendalian kebijakan, serta penegakan regulasi daerah agar pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Faktor internal berupa motivasi, pengalaman, dan komitmen ini secara signifikan mempengaruhi perilaku politik *incumbent* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Darma mengungkapkan pada wawancara bahwa merasa bagus terhadap anggota legislatif *incumbent* dengan kinerja ketimbang dengan yang baru terpilih, selengkapnya sebagai berikut:

"Lebih bagus yang sudah dua kali terpilih. Karena memang terbukti kinerjanya, tidak mungkin dia pilih kembali kalau kinerjanya itu tidak bagus, pasti karna kinerja beliau bagus jadi masyarakat memilih kembali beliau"⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara, perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dalam pelayanan publik tergolong baik dibandingkan dengan anggota legislatif yang baru terpilih. Menurutnya, *incumbent* yang telah terpilih lebih dari satu periode menunjukkan kinerja yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Pengalaman serta rekam jejak yang dimiliki membuat mereka lebih memahami kebutuhan warga dan lebih responsif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Terpilihnya kembali seorang anggota legislatif merupakan bukti kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya. Masyarakat tidak akan memilih kembali wakil rakyat apabila tidak menunjukkan hasil kerja yang memuaskan. Hal ini mencerminkan bahwa perilaku politik *incumbent* dalam memberikan pelayanan

⁶⁷ Darma Masyarakat kecamatan Soreang wawancara di Kota Parepare, 26 November 2025

publik dinilai efektif, konsisten, dan mampu memenuhi harapan masyarakat, sehingga memperoleh legitimasi politik melalui pemilihan ulang.

Erma mengungkapkan bahwa pelayanan *publik* yang didapatkan oleh anggota legislatif *incumbent* ini terbilang cepat dan mampu memberikan Solusi kepada Masyarakat ,selengkapnya sebagai berikut :

“Respon yang diberikan sangat cepat dan kami diberikan solusi dari keluhan yang kami ajukan. Langsung diberikan solusi bila ada masukan keluhan dari masyarakat, akan ditindaklanjuti, dilapor ke bagian pemerintahan sesuai dengan keluhan yang ada langsung beliau melapor secepatnya.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara, Erma mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik adalah kecepatan dan responsivitas dalam menanggapi keluhan masyarakat. *Incumbent* dinilai mampu memberikan solusi secara langsung ketika masyarakat menyampaikan permasalahan, tanpa proses yang berbelit-belit. Sikap tanggap ini menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan fungsi pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja anggota legislatif.

Tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota legislatif *incumbent* melalui koordinasi dan pelaporan kepada instansi pemerintahan yang berwenang merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan tugasnya. Koordinasi yang baik dengan bagian pemerintahan terkait membuat penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini mencerminkan bahwa pengalaman, pemahaman terhadap mekanisme birokrasi, serta jaringan kerja yang dimiliki *incumbent* berperan besar dalam membentuk perilaku politik yang efektif dalam pelayanan publik.

Namri Nasir dalam wawancara menjelaskan bahwa mengenai aduan atau keluhan Masyarakat diturunkan ke dalam pokir yang nantinya akan ditindaklanjuti keluhan, selengkapnya sebagai berikut :

⁶⁸ Erma Masyarakat Kecamatan Soreang Wawancara di Kota Parepare, 2 Desember 2025

“Kalau keluhan kami ini teman-teman di DPR, kan permintaan masyarakat itu banyak maka kami tuangkan lewat pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran teman-teman anggota dewan tujuannya untuk saling bertukar pendapat dan mencari solusi terbaik untuk menanggapi permintaan masyarakat tersebut. Tetapi kami dihadapkan dengan realita bahwa terkendala dengan anggaran APBD yang sekarang ini sangat sensitif dan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara, faktor internal yang mempengaruhi perilaku politik Namri Nasir sebagai anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik tercermin dari cara ia menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme pokok-pokok pikiran. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran, pemahaman, dan komitmen pribadi dalam menjalankan fungsi representasi dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai dasar pengusulan program. Sikap ini menggambarkan orientasi pelayanan dan tanggung jawab internal anggota legislatif dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, meskipun realisasinya tidak selalu dapat terpenuhi secara maksimal.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare pada Komisi I bidang hukum dan pemerintahan mencakup peran dalam perencanaan kebijakan, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan daerah. Dalam konteks pelayanan publik, ia bertugas mengawal aspirasi warga melalui pokok pokok pikiran agar dapat diakomodasi dalam APBD, sekaligus memahami dan menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran serta kebijakan efisiensi. Faktor internal seperti pemahaman terhadap prosedur, komitmen, dan sikap realistis terhadap kondisi keuangan daerah mempengaruhi perilaku politik *incumbent* dalam menjalankan pelayanan publik.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan unsur penting yang turut mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan

⁶⁹ Namri Nasir anggota legislatif *incumbent* wawancara di kecamatan Soreang , 28 November 2025

Soreang Kota Parepare. Faktor ini mencakup lingkungan sosial, kondisi politik, kebijakan pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, serta tuntutan dan partisipasi masyarakat yang berkembang di wilayah tersebut. Selain itu, hubungan dengan birokrasi, dinamika partai politik, dan regulasi yang berlaku juga berperan dalam menentukan sejauh mana anggota legislatif mampu menjalankan fungsi representasi dan advokasi pelayanan publik. Dengan demikian, kajian terhadap faktor eksternal menjadi relevan untuk memahami bagaimana konteks di luar individu anggota legislatif membentuk dan mempengaruhi perilaku politik mereka dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Selaku Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir memberikan informasi terkait faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif

“Dalam menjalankan tugas tentu punya tantangan, tantangan terberat itu ketika keinginan masyarakat atau keinginan pemerintah tidak berkorelasi dengan kepentingan partai politik kita, tapi partai yang bijak itu selalu memberi ruang yang terbuka seluas luasnya kepada anggota DPRDnya untuk menyerap aspirasi masyarakat kalau pun ada perbedaan keinginan partai tentu itu masih bisa di diskusikan , yang kedua itu tantangan kita saat ini terkait politik anggaran sekarang pemerintah pusat sudah memperketat keuangan dana transport ke daerah, nah ini juga menjadi hambatan karna kenapa, dalam membangun tentu pemerintah daerah mengandalkan kekuatan fiskal , nah kekuatan fiskal ini yang selalu tidak jelas apalagi sekarang APBD kita turun dan transport kita dari pusat turun jadi memang dibutuhkan kreativitas antara walikota kepala daerah dengan DPRD di undang-undang, penyelenggaraan pemerintah itu ada 2 walikota dengan DPRD jadi memang DPRD dengan walikota sebagai mitra yang sejajar harus selalu seirama jadi syaratnya kalau mau bagus walikotanya harus cerdas, DPRnya juga harus cerdas dan kolaborasinya harus bagus. Saya baru-baru ini mengikuti Musrembang ini, kalau tidak salah ada 600 an lebih usulan masyarakat semua se Parepare dan itu kalau di uangkan sampai puluhan miliar sementara kekuatan fiskal kita keuangan kita itu rendah. coba saya gambarkan sedikit APBD Parepare , 888 miliar lebih untuk belanja pegawai kita itu 51% artinya setengah dari 888 itu di habiskan untuk membayar gaji pegawai termasuk gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu berarti hanya setengahnya digunakan untuk pembangunan, itu belum biaya rutin kantor listrik BBM perjalanan dinas, sehingga yang digunakan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat kecil mungkin dibawah 100 miliar, boleh jadi hanya 50 miliar, artinya kalau masyarakat menjadikan indikator bahwa keberhasilan sebuah pemerintah itu

kelihatan dari bangunan fisiknya pasti masyarakat mengatakan mundur jadi kendalanya terutama dari anggaran, efisiensi anggaran juga mempengaruhi faktor pelayanan.”⁷⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif dalam pelayanan publik cukup besar, terutama berasal dari lingkungan kebijakan dan kondisi keuangan daerah. Salah satunya adalah adanya perbedaan antara keinginan masyarakat, pemerintah, dan arah kebijakan partai yang kadang tidak sejalan. Selain itu, kebijakan dari pemerintah pusat yang memperketat alokasi dana ke daerah juga menjadi hambatan, karena hal ini langsung berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Kondisi keterbatasan anggaran daerah merupakan faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya realisasi berbagai aspirasi masyarakat. Banyaknya usulan dari masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin. Akibatnya, anggaran yang benar-benar bisa digunakan untuk pelayanan langsung ke masyarakat menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat anggota legislatif harus menyesuaikan kebijakan dan prioritas, serta membutuhkan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah agar pelayanan publik tetap bisa berjalan meskipun dalam keterbatasan.

Perilaku politik anggota legislatif dalam pelayanan publik di Kecamatan Soreang menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi mereka ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi di sisi lain juga harus mempertimbangkan aturan partai dan kondisi anggaran yang terbatas. Akibatnya, tindakan mereka tidak selalu bisa memenuhi semua keinginan warga, bukan karena

⁷⁰ Kaharuddin Kadir Anggota legislatif *Incumbent* wawancara di kecamatan Soreang, 17 Februari 2026

tidak mau, tetapi karena ada keterbatasan dana dan prioritas yang harus diatur. Jadi, perilaku politiknya cenderung adaptif dan realistis, yaitu tetap mencoba melayani masyarakat semaksimal mungkin sambil menyesuaikan dengan situasi yang ada.

Darma dalam wawancara mengungkapkan apa yang menjadi harapannya untuk diperbaiki lagi ke depannya yaitu untuk lebih peduli lagi terhadap masyarakat serta perbaikan infrastruktur, selengkapnya sebagai berikut:

"Iya, lebih peduli kepada masyarakat begitu, kemudian perbaikan-perbaikan infrastruktur lebih ditingkatkan lagi, karena kalau seperti jalan diperbaiki, maka akan lebih banyak masyarakat juga akan merasa senang."⁷¹

Senada dengan yang diungkapkan imam yang mengungkapkan bahwa;

"Kalau saya, kayak ke dinas-dinas terkait, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Keuangan kalau mau mengurus, seperti PKH, cukup dimudahkan semua prosesnya, Infrastruktur di Parepare rata-rata sangat baik, hanya satu yang masih menjadi masalah yaitu jalan-jalan yang rusak di lorong lorong. Kalau jalan-jalan poros aman semua."⁷²

Berdasarkan hasil wawancara, faktor yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik adalah tuntutan dan harapan masyarakat agar wakil rakyat lebih peduli terhadap kebutuhan riil warga. Darma menekankan pentingnya peningkatan kepedulian anggota legislatif terhadap masyarakat serta perbaikan infrastruktur, khususnya jalan. Infrastruktur yang baik dipandang sebagai bentuk pelayanan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan publik terhadap kinerja legislatif.

Perilaku politik *incumbent* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa kondisi pelayanan birokrasi dan kualitas infrastruktur wilayah. Imam menilai bahwa pelayanan di dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Keuangan, sudah berjalan dengan baik dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan bantuan seperti PKH. Namun, masih

⁷¹ Darma masyarakat kecamatan Soreang wawancara di Kota Parepare , 26 November 2025

⁷² Imam masyarakat kecamatan Soreang wawancara di Kota Parepare, 26 November 2025

terdapat persoalan pada infrastruktur jalan di lorong-lorong permukiman yang belum memadai. Kondisi ini mendorong harapan masyarakat agar anggota legislatif *incumbent* lebih aktif memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan.

Erma dalam wawancara memberikan pendapatnya tentang apa yang menjadi harapan yaitu agar janji-janji terhadap Masyarakat agar direalisasikan agar masyarakat dapat merasakan, selengkapnya sebagai berikut :

"Iya, harapannya ya. Agar itu yang janji-janjinya toh, yang belum realisasi harusnya ditepati. Supaya masyarakat tidak hanya diberikan harapan saja. Supaya bisa masih bisa terpilih lagi 5 tahun kemudian."⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erma, faktor yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik adalah komitmen terhadap realisasi janji politik. Masyarakat menaruh harapan besar agar janji-janji yang telah disampaikan oleh anggota legislatif pada masa kampanye maupun selama masa jabatan benar-benar diwujudkan dalam bentuk program dan kebijakan nyata. Realisasi janji tersebut menjadi indikator utama bagi masyarakat dalam menilai keseriusan dan tanggung jawab *incumbent* dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Perilaku politik *incumbent* turut dipengaruhi oleh pertimbangan terhadap keberlanjutan dukungan politik dan tingkat elektabilitas dalam kontestasi politik. Erma menegaskan bahwa pemenuhan janji tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga menentukan peluang *incumbent* untuk kembali terpilih pada periode berikutnya. Dengan demikian, perilaku politik anggota legislatif dalam pelayanan publik cenderung dipengaruhi oleh upaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui konsistensi antara janji dan realisasi, sebagai strategi mempertahankan legitimasi dan dukungan politik.

⁷³ Erma Masyarakat Kecamatan Soreang wawancara di Kota Parepare , 2 Desember 2025

Namri nasir mengungkapkan bahwa mengenai sebagaimana salah satu fungsi DPRD sebagai pengawasan, akan membenahi masalah pembangunan agar tidak ada pembangunan yang fiktif, selengkapya sebagai berikut ;

"Tanggapan saya terhadap apa namanya, Keluhan masyarakat terkait masalah pembangunan, karena pembangunan itu sebetulnya itu bukan wewenang sepenuhnya DPR. Cuma fungsi pengawasan kami di DPR terkait masalah pembangunan. Nah, itu kami nanti teman-teman di DPR untuk membenahi ini pembangunan. Jangan sampai pembangunan di Parepare ini di Parepare ini terkesan bahwa dia seakan-akan tidak ada yang mengawasi. Nah, itu kami yang hadir sebagai fungsi pengawasan. Kami hadir untuk meluruskan ini, pembangunan. Jangan sampai ada pembangunan yang fiktif, yang tidak jelas anggarannya, dan yang tidak jelas pekerjaannya. Nah, itulah kami yang luruskan ini di DPR."⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik Namri Nasir sebagai anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik berkaitan dengan kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah. Keluhan masyarakat mengenai pembangunan menjadi tekanan eksternal yang mendorong DPRD untuk bersikap aktif, meskipun pembangunan bukan sepenuhnya kewenangan legislatif. Situasi ini menuntut adanya pengawasan dari DPRD agar pembangunan yang dilakukan oleh pihak eksekutif tidak menimbulkan penyimpangan, seperti proyek fiktif, ketidakjelasan anggaran, maupun pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare pada Komisi I bidang hukum dan pemerintahan mencakup pengawasan terhadap kebijakan serta program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks pelayanan publik, ia berperan mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas. Faktor eksternal berupa dinamika pembangunan, kebijakan pemerintah daerah, serta tuntutan dan keluhan masyarakat turut membentuk perilaku politik *incumbent* dalam

⁷⁴ Namri Nasir Anggota legislatif *Incumbent* wawancara di Kecamatan Soreang , 28 November 2025

menjalankan fungsi pengawasan demi terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.

Namri Nasir juga mengungkapkan harapannya sebagai anggota legislatif *incumbent* dalam wawancara bahwa untuk permintaan-permintaan Masyarakat dapat cepat *tercover* seperti program bedah rumah, selengkapanya sebagai berikut:

"Harapan saya ini, semoga di tahun 2025 itu permintaan-permintaan masyarakat Parepare ini ter-cover semua, termasuk bedah rumah. Itu saja harapan saya. Bedah rumah, bansos, termasuk program-program Pak Walikota yang tertunda kemarin, ya, insyaallah kami di DPR akan kawal ini pembangunan. Saya kira itu, Dek."⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik Namri Nasir sebagai anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik tercermin dari adanya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pemenuhan program-program sosial dan pembangunan daerah. Permintaan masyarakat terkait bedah rumah, bantuan sosial, serta kelanjutan program pemerintah kota yang sempat tertunda menjadi dorongan eksternal bagi anggota legislatif untuk bersikap aktif dan responsif. Harapan agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi sosial dan kebijakan pemerintah daerah sangat mempengaruhi arah dan fokus perilaku politik *incumbent*.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare pada Komisi I bidang hukum dan pemerintahan mencakup peran dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan serta program pemerintah daerah. Dalam konteks pelayanan publik, ia bertugas mengawal pelaksanaan program pembangunan dan sosial agar berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah kota, program Walikota, serta kebutuhan dan harapan masyarakat menjadi unsur penting yang membentuk perilaku politik *incumbent* dalam memperjuangkan pelayanan publik yang berkelanjutan dan berpihak pada warga.

⁷⁵ Namri Nasir Anggota legislatif *incumbent* wawancara di kecamatan soreang, 28 November 2025

Darma mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan anggaran sehingga ada keluhan yang belum terlaksana ,selengkapya sebagai berikut :

"Kalau mengatakan hal mengenai pokok pikiran, Ya kita juga mengerti sekarang kan memang efisiensi anggaran. Dan tentu hal- hal yang dianggap penting-penting terlebih dahulu di realisasikan."⁷⁶

Senada dengan yang ungkapkan oleh Agus Asbar, sebagai berikut :

"Ada memang alasannya kenapa ada keluhan ini belum terealisasi. Termasuk kan Indrisari dulu saya tanya, Bu, kenapa ini banyak pengajuannya masyarakat, bahkan dari tahun lalu belum terealisasi. Ada pengajuannya masyarakat, belum teralisasi sampai sekarang belum terpenuhi. Nah, kenapa sampai sekarang tidak dikonfirmasi, Tapi ternyata memang ada alasannya, bahwa dana yang ada disana tidak mencukupi untuk merealisasikan pengajuan dari masyarakat tersebut."⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darma, faktor yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik adalah keterbatasan anggaran daerah dan kebijakan efisiensi keuangan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua keluhan dan usulan masyarakat, meskipun telah disampaikan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir), dapat segera direalisasikan. Oleh karena itu, anggota legislatif cenderung memprioritaskan program-program yang dianggap paling mendesak dan penting bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Kondisi keterbatasan pendanaan dalam pelaksanaan program merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sebagian aspirasi masyarakat belum dapat direalisasikan. Agus Asbar menegaskan bahwa sejumlah pengajuan masyarakat telah disampaikan sejak tahun sebelumnya, namun belum terealisasi karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dalam pelayanan publik dipengaruhi oleh realitas fiskal daerah, sehingga menuntut adanya

⁷⁶ Darma Masyarakat kecamatan Soreang wawancara di Kota Parepare, 26 November 2025

⁷⁷ Agus Asbar Masyarakat kecamatan Soreang wawancara di Kota Parepare, 25 November 2025

pengelolaan anggaran yang selektif serta komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait kendala yang dihadapi.

Namri Nasir dalam wawancara mengungkapkan adanya faktor yang mempengaruhi terkendalanya permintaan masyarakat yang dikarenakan terkendala oleh anggaran APBD, selengkapnya sebagai berikut :

"Iya, kalau keluhan kami ini teman-teman di DPR kan permintaan masyarakat itu kami turunkan itu lewat pokok-pokok pikiran, Pokok pokok pikiran teman-teman anggota dewan, tetapi terkendala dengan anggaran APBD yang sekarang ini efisiensi anggaran. Tahun kemarin saya punya apa, program pokok pikiran kemarin bedah rumah 15 rumah ke masyarakat. Nah, yang terealisasi sekarang ini cuma enam. Nah, ini niat kami sebetulnya itu teman-teman DPR untuk minta ke Pemkot untuk menambah ini pokok pikiran, karena tujuannya juga kan ke masyarakat."⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik Namri Nasir sebagai anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah dan kebijakan efisiensi APBD. Meskipun aspirasi masyarakat telah disalurkan melalui pokok-pokok pikiran, realisasi program tidak sepenuhnya dapat terpenuhi akibat keterbatasan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari program bedah rumah yang sebelumnya disetujui untuk 15 rumah, namun yang terealisasi hanya enam rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor anggaran dan kebijakan pemerintah daerah menjadi pengaruh eksternal utama dalam menentukan keberhasilan pelayanan publik.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare pada Komisi I bidang hukum dan pemerintahan mencakup peran dalam mengawasi dan mengawal kebijakan anggaran serta program pemerintah. Dalam konteks pelayanan publik, ia berupaya mengadvokasi penambahan alokasi pokok pikiran kepada Pemerintah Kota agar kebutuhan masyarakat dapat lebih banyak terakomodasi. Faktor eksternal seperti kebijakan efisiensi anggaran, kondisi

⁷⁸ Namri Nasir Anggota legislatif *Incumbent* wawancara di kecamatan Soreang, 28 November 2025

keuangan daerah, dan keputusan pemerintah mempengaruhi perilaku politik *incumbent* dalam memperjuangkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Namri Nasir mengungkapkan bahwa kami dari anggota DPRD mengusulkan untuk pendataan-pendataan yang dikombain dengan pendataan yang ada di kelurahan dan yang ada di dinas sosial supaya lebih tepat sasaran, selengkapnya sebagai berikut :

"Strategi saya ya itu tadi yang saya maksud tadi untuk bersinergi dengan Pak Walikota, untuk masyarakat ini untuk jadi ditingkatkan semua aspirasinya. Contoh kecilnya penerima manfaat itu yang dulunya DTKS, sekarang kan DTKN. Ya itu kan ada beberapa masyarakat yang mengeluh terkait masalah itu, haknya yang tidak terpenuhi, tidak dia terima. Ini kami mengusulkan untuk pendataan-pendataan yang dikombain dengan pendataan yang ada, di kelurahan dengan dinas sosial, supaya lebih tepat sasaran."⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik Namri Nasir sebagai anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik terlihat dari dinamika kebijakan pemerintah daerah dan sistem pendataan penerima manfaat. Perubahan kebijakan data penerima bantuan, dari DTKS ke DTKN, menimbulkan keluhan masyarakat karena adanya hak yang tidak terpenuhi. Kondisi ini menjadi faktor eksternal yang mendorong anggota legislatif untuk bersikap aktif dalam merespons permasalahan pelayanan publik agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare di Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan diwujudkan melalui peran pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam konteks pelayanan publik, ia menjalankan fungsi advokasi dengan membangun sinergi bersama Wali Kota serta mengusulkan perbaikan sistem pendataan melalui penggabungan data kelurahan dan Dinas Sosial. Faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah, sistem

⁷⁹ Namri Nasir Anggota legislatif *incumbent* wawancara di kecamatan Soreang, 28 November 2025

administrasi, dan koordinasi antarinstansi mempengaruhi perilaku politik *incumbent* dalam mengupayakan pelayanan publik yang lebih adil dan tepat sasaran.



B. Pembahasan

1. Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik

a. Perilaku Representatif dan Responsif

Perilaku representatif dan responsif anggota legislatif dalam perspektif teori sistem politik David Easton, dipahami melalui mekanisme *input-output*, di mana aspirasi dan tuntutan masyarakat Kecamatan Soreang sebagai *input* diproses oleh anggota legislatif *incumbent* dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan, pengawasan, serta pelayanan publik sebagai *output*. Hal ini tercermin dalam perilaku politik anggota DPRD, khususnya Bapak Namri Nasir sebagai anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, yang memiliki fungsi dan wewenang membahas dan mengawasi peraturan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, serta kinerja eksekutif di tingkat kecamatan dan kelurahan. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, Bapak Namri Nasir berperan menyalurkan aspirasi masyarakat, merespons keluhan terkait pelayanan publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Perilaku representatif dan responsif anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang Menurut teori sistem politik *input-output*, dimana keluhan dan aspirasi masyarakat berfungsi sebagai *input* yang masuk ke dalam sistem politik, kemudian direspons melalui tindakan nyata sebagai *output*. Penilaian warga Kecamatan Soreang menunjukkan bahwa pelayanan publik di Parepare cukup responsif, terutama ketika aspirasi disampaikan melalui RT/RW maupun dalam kegiatan Reses / Kunjungan Dapil, yang mencerminkan perilaku representatif *incumbent* dalam menyerap dan menyalurkan kepentingan masyarakat. Tindak lanjut yang cepat terhadap aduan, termasuk dalam bidang kesehatan seperti permasalahan BPJS, menunjukkan perilaku responsif anggota DPRD yang mampu mengkonversi *input* masyarakat menjadi *output* berupa koordinasi langsung dengan instansi terkait. Hal ini menegaskan bahwa kedekatan antara legislatif dan

masyarakat serta pemanfaatan forum Reses / Kunjungan Dapil menjadi mekanisme penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja politik *incumbent* di Kecamatan Soreang.

Perilaku representatif dan responsif anggota legislatif *incumbent* dapat dipahami melalui teori sistem politik David Easton, alur *input-output*, di mana aspirasi dan keluhan masyarakat sebagai *input* diserap melalui mekanisme Reses / Kunjungan Dapil dan kemudian direspons melalui tindakan serta rencana kebijakan sebagai *output*. Berdasarkan temuan perilaku representatif anggota legislatif *incumbent* tercermin dari keterbukaan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, seperti persoalan banjir saat kegiatan Reses / Kunjungan Dapil, yang menegaskan peran anggota legislatif sebagai wakil rakyat dalam menyerap aspirasi publik. Sementara itu, perilaku responsif ditunjukkan oleh sikap Bapak Namri Nasir yang tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga memberikan tanggapan konkret dengan menyatakan kesediaan turun langsung ke lapangan serta meminta RT dan RW melakukan pendataan rinci sebagai dasar tindak lanjut. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, Bapak Namri Nasir memiliki tugas pokok dan fungsi dalam membahas dan mengawasi peraturan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, serta kinerja aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga respons tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan representasi politik untuk mendorong perbaikan pelayanan publik agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dalam pelayanan publik dapat dipahami melalui alur *input-output*. Berdasarkan teori sistem politik David Easton, di mana tuntutan dan aspirasi masyarakat berfungsi sebagai *input* yang masuk ke dalam sistem politik, kemudian diproses oleh lembaga legislatif dan pemerintah untuk menghasilkan *output* berupa kebijakan atau realisasi program. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perilaku representatif anggota legislatif *incumbent* tercermin dari keterbukaan dan akses masyarakat dalam menyampaikan pengajuan

pelayanan, yang dinilai sudah berjalan dengan baik. Aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi tetap ditampung dan diteruskan hingga ke instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, menandakan bahwa fungsi representasi tetap dijalankan meskipun belum menghasilkan *output* yang optimal. Sementara itu, perilaku responsif terlihat dari upaya anggota legislatif, termasuk Bapak Namri Nasir sebagai anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, dalam menindaklanjuti aspirasi melalui koordinasi lintas lembaga, pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, serta memastikan aspirasi tercatat dalam mekanisme pemerintahan. Tugas Komisi I meliputi pembidangan urusan pemerintahan umum, hukum, ketertiban, serta pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Dengan demikian, meskipun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang mempengaruhi realisasi *output* pelayanan publik, perilaku politik *incumbent* tetap menunjukkan sikap representatif dan responsif sesuai dengan peran kelembagaan dan fungsi pengawasannya.

Penelitian penulis menjawab kekosongan dari studi (1) Iqbal Syafrudin yang berfokus pada peran anggota badan legislatif perempuan dalam perspektif gender di DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI yang membahas mengenai peran anggota legislatif perempuan di DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI dalam mewujudkan kesetaraan gender di komisi yang mereka duduki. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa efektivitas perilaku representatif dan responsif legislator *incumbent* tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kemampuan individu anggota legislatif dalam merespons *input* masyarakat dan mengonversinya menjadi *output* kebijakan dan tindakan nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan temuan penelitian, perilaku representatif dan responsif anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang dapat dianalisis melalui teori sistem politik David Easton, khususnya pada mekanisme *input* dan *output*. Dalam kerangka ini, aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan pada saat Reses / Kunjungan Dapil merupakan bentuk *input* yang masuk ke dalam sistem politik. Kemudahan akses yang diberikan

kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan menunjukkan perilaku representatif anggota legislatif dalam menjalankan fungsi penyaluran aspirasi. Selanjutnya, *output* terlihat dari respons konkret anggota legislatif, seperti komitmen Bapak Namri Nasir untuk turun langsung ke lapangan meninjau kondisi banjir serta mengoordinasikan RT dan RW untuk melakukan pendataan masalah secara rinci, yang mencerminkan perilaku responsif terhadap tuntutan publik. Perilaku ini sejalan dengan fungsi Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan

Hasil temuan penulis telah menjawab atas kekosongan dalam studi (2) Bella Putriwani dengan menggambarkan bagaimana strategi politik *incumbent* dan faktor-faktor penyebab kekalahan pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Bangka. Jika penelitian sebelumnya menyoroti bagaimana strategi politik *incumbent* dan apa yang menjadi faktor kekalahannya, penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks pelayanan publik, perilaku representatif dan responsif *incumbent* berfungsi sebagai mekanisme sistem politik yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kinerja pemerintahan, sehingga berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perilaku representatif dan responsif anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang dapat dianalisis melalui teori sistem politik David Easton yang memandang aspirasi dan keluhan masyarakat sebagai *input* yang masuk ke dalam sistem politik dan kemudian diproses menjadi *output* berupa kebijakan, tindakan, atau pengawasan pelayanan publik. Berdasarkan temuan penelitian, perilaku representatif tercermin dari keterbukaan anggota legislatif *incumbent* dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung pada kegiatan Reses / Kunjungan Dapil, sehingga kebutuhan dan permasalahan warga dapat terartikulasi dengan baik. Sementara itu, perilaku responsif terlihat dari adanya tindak lanjut konkret atas *input* tersebut, seperti kesediaan Bapak Namri Nasir untuk turun langsung meninjau lokasi banjir serta

mengoordinasikan pendataan masalah melalui RT dan RW sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi I bidang hukum dan pemerintahan. Pola ini menunjukkan bahwa *input* masyarakat tidak berhenti pada tahap penyerapan aspirasi, tetapi diproses dalam sistem politik hingga menghasilkan *output* berupa tindakan pengawasan dan koordinasi lintas pemerintahan yang berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Penelitian penulis menjawab kekosongan dari studi (3) Nurfadillah Nasruddin yang fokus pada Strategi *Incumbent* dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Maros. Jika penelitian sebelumnya menyoroti mengenai strategi pemenangan *incumbent* di Maros, yang menekankan pentingnya komunikasi intens dan pendekatan kekeluargaan jauh sebelum pemilihan dimulai. Dengan menggunakan teori sistem politik David Easton *Input-Output*, perilaku anggota legislatif *incumbent* di Kecamatan Soreang menunjukkan fungsi Representatif yang kuat, di mana *input* berupa kebutuhan dan dukungan masyarakat (termasuk keluhan yang disampaikan melalui Reses / Kunjungan Dapil/RT/RW) direspons menjadi *output* positif. Hal ini terbukti dari penilaian warga mengenai peningkatan dan kemudahan akses pelayanan publik serta tindakan cepat *incumbent* dalam menangani masalah spesifik seperti kendala BPJS, yang mencerminkan fungsi Responsif efektif dan proaktif. Strategi komunikasi intens ini diterjemahkan menjadi perilaku Representatif yang menjaga saluran *input* dan Responsif yang menghasilkan *output* kebijakan cepat. Namun, pengamatan bahwa kualitas pelayanan masih belum sepenuhnya merata menunjukkan bahwa meskipun *incumbent* berhasil mengelola *input* relasional dan aduan spesifik, *output* sistem politik masih menghadapi tantangan konsistensi, menciptakan umpan balik (*feedback*) yang memerlukan perbaikan menyeluruh agar dukungan masyarakat tetap terjaga dan strategi pemenangan *incumbent* tidak hanya bergantung pada kedekatan personal, tetapi juga pada kinerja pelayanan publik yang adil.

b. Perilaku Advokasi Kebijakan

Analisis perilaku advokasi dan kebijakan anggota legislatif dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem politik David Easton yang menekankan mekanisme *input-output*. Aspirasi, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Soreang diposisikan sebagai *input* yang masuk ke dalam sistem politik melalui anggota legislatif *incumbent*, kemudian diproses menjadi *output* berupa kebijakan, fungsi pengawasan, dan upaya perbaikan pelayanan publik. Dalam menjalankan fungsi advokasi kebijakan sebagai wakil rakyat. Dalam konteks ini, Bapak Namri Nasir sebagai anggota DPRD Komisi I bidang hukum dan pemerintahan memiliki tugas pokok dan fungsi meliputi pembahasan dan pengawasan peraturan daerah, kebijakan pemerintahan, serta kinerja aparatur pemerintah daerah, termasuk camat dan lurah, sehingga perannya tidak hanya menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga mengadvokasikannya ke dalam proses perumusan kebijakan dan memastikan implementasi pelayanan publik berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perilaku advokasi dan kebijakan anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang, Dalam teori sistem politik David Easton, yang menjelaskan bahwa tuntutan dan keluhan masyarakat berfungsi sebagai *input* yang diproses dalam sistem politik untuk menghasilkan *output* berupa tindakan dan kebijakan publik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan Reses / Kunjungan Dapil dimanfaatkan oleh *incumbent* sebagai saluran advokatif untuk menampung langsung persoalan masyarakat, seperti masalah banjir, sehingga aspirasi warga dapat masuk ke dalam sistem politik secara formal. Respons cepat dan terbuka, termasuk komitmen meninjau langsung lokasi banjir serta arahan kepada RT/RW untuk mencatat dan menindaklanjuti keluhan, mencerminkan kemampuan *incumbent* mengonversi *input* masyarakat menjadi output berupa tindakan kebijakan dan solusi lapangan. Mekanisme tindak lanjut yang terstruktur ini menegaskan bahwa perilaku politik anggota legislatif *incumbent* tidak bersifat simbolik semata, melainkan berorientasi pada advokasi kepentingan publik dan

perumusan kebijakan yang responsif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Soreang.

Perilaku advokasi dan kebijakan anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang Menurut teori sistem politik David Easton, yang memandang keluhan dan aspirasi masyarakat sebagai *input* yang masuk ke dalam sistem politik untuk kemudian diproses menjadi *output* berupa tindakan dan kebijakan publik. Keluhan warga yang disampaikan dalam kegiatan Reses / Kunjungan Dapil atau pertemuan diterima secara terbuka dan segera ditanggapi oleh anggota legislatif, menunjukkan peran advokatif *incumbent* dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah. Respons cepat serta tindakan langsung menghubungi instansi terkait, seperti dalam penanganan persoalan pemasangan lampu jalan, merupakan bentuk konkret *output* kebijakan dari *input* masyarakat. Proses ini menegaskan bahwa perilaku politik anggota legislatif *incumbent* tidak hanya komunikatif, tetapi juga proaktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata, sehingga pelayanan publik di Kecamatan Soreang menjadi lebih responsif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Perilaku advokasi kebijakan anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik dapat dipahami melalui teori sistem politik David Easton yang menempatkan aspirasi dan permasalahan masyarakat sebagai *input* yang diproses dalam sistem politik untuk menghasilkan *output* berupa kebijakan, pengawasan, dan perbaikan pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara, perilaku advokasi kebijakan yang ditunjukkan oleh Bapak Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare tercermin dari komitmennya dalam membenahi dan meluruskan implementasi regulasi pelayanan publik yang dinilai belum berjalan optimal, khususnya pada aspek pendataan penerima layanan. Melalui forum Musrenbang, ia mengadvokasi pengecekan ulang dan pengintegrasian data lintas instansi, seperti Dinas Sosial dan BKKBN, agar aspirasi masyarakat terutama lansia dan kelompok rentan seperti masyarakat terdampak stunting dapat diproses secara akurat dalam sistem politik dan menghasilkan *output* kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan. Dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, Namri Nasir melaksanakan fungsi legislasi dengan mendorong pembenahan regulasi daerah, fungsi anggaran dengan mengawal alokasi sumber daya agar berpihak pada kebutuhan masyarakat, serta fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan. Dengan demikian, perilaku politik *incumbent* yang ditunjukkan tidak hanya bersifat responsif terhadap *input* masyarakat, tetapi juga advokatif dalam memastikan *output* pelayanan publik berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta kepentingan publik.

Penelitian penulis menjawab kekosongan yang belum disentuh oleh studi sebelumnya, pada penelitian (1) Iqbal Syafrudin yang menyoroti tentang Peran anggota badan legislatif perempuan dalam perspektif gender anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI dalam penelitian terdahulu menegaskan bahwa secara regulatif tidak terdapat hambatan dalam menjalankan peran politik, namun tantangan utama terletak pada praktik dan implementasi di lapangan. Penelitian Penulis tidak berfokus pada perspektif gender, melainkan pada perilaku advokasi kebijakan *incumbent* secara umum dalam pelayanan publik. Dalam kerangka teori sistem politik David Easton, yang memandang tuntutan, keluhan, dan kebutuhan masyarakat sebagai *input* yang kemudian diproses dalam sistem politik untuk menghasilkan *output* berupa kebijakan dan tindakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Reses / Kunjungan Dapil dimanfaatkan oleh *incumbent* sebagai saluran advokatif untuk menampung langsung persoalan masyarakat, seperti banjir dan pemasangan lampu jalan, sehingga aspirasi warga dapat masuk secara formal ke dalam sistem politik. Respons cepat, sikap terbuka, serta tindakan langsung berkoordinasi dengan instansi terkait mencerminkan kemampuan *incumbent* mengonversi *input* masyarakat menjadi *output* kebijakan dan solusi lapangan yang nyata.

Penelitian penulis turut menjawab kekosongan yang belum tergali dalam studi (2) Bella Putriwani dengan menggambarkan bagaimana strategi politik *incumbent*

serta apa yang menjadi faktor-faktor penyebab kekalahan pada pemilihan legislatif 2019 Kabupaten Bangka, penelitian terdahulu menekankan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat sebagai strategi politik *incumbent*, meskipun fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian penulis. Dalam kerangka Teori sistem politik David Easton, yang menempatkan aspirasi, tuntutan, dan keluhan masyarakat sebagai *input* yang kemudian diproses dalam sistem politik untuk menghasilkan *output* berupa kebijakan dan tindakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluhan warga yang disampaikan melalui kegiatan Reses / Kunjungan Dapil dan pertemuan langsung diterima secara terbuka dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait, pembenahan regulasi, serta pelurusan implementasi kebijakan melalui forum Musrenbang. Proses ini mencerminkan peran advokatif *incumbent* dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah agar output kebijakan lebih tepat sasaran, adil, dan akuntabel.

Penelitian Penulis menjawab kekosongan yang belum di gali dalam studi (3) Nurfadilah nasiruddin dengan menggambarkan strategi *Incumbent* dalam kemenangan pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Maros, menekankan pada pentingnya komunikasi intens dan pendekatan kekeluargaan *incumbent* dengan masyarakat, meskipun fokus penelitiannya lebih pada strategi kemenangan pemilu. Penelitian penulis menempatkan advokasi kebijakan dalam kerangka sistem politik, di mana komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat menjadi sarana utama dalam menyerap *input* dan mengawalinya hingga menjadi *output* kebijakan. Dengan menjalankan Bapak Namri Nasir tugas pokok dan fungsi sebagai anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, perilaku politik *incumbent* tidak hanya bersifat komunikatif, tetapi juga advokatif dan institusional dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kecamatan Soreang. Perilaku advokasi dan kebijakan anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang dengan menggunakan teori sistem politik David Easton, yang memandang aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat sebagai

input yang masuk ke dalam sistem politik untuk kemudian diproses menjadi *output* berupa kebijakan, regulasi, dan tindakan pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara, perilaku advokasi kebijakan yang ditunjukkan oleh Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare tercermin dari komitmennya dalam membenahi dan meluruskan implementasi regulasi pelayanan publik yang secara normatif telah tersedia, namun masih lemah pada tataran pelaksanaan, khususnya terkait akurasi pendataan penerima manfaat. Melalui forum Musrenbang, dengan mengadvokasi pengecekan ulang dan pengintegrasian data lintas instansi seperti Dinas Sosial dan BKKBN agar *input* masyarakat, terutama lansia dan kelompok rentan seperti masyarakat terdampak stunting, dapat diolah secara tepat dan menghasilkan *output* kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran

c. Perilaku Komunikatif dan Persuasif

Perilaku komunikatif dan persuasif anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang. Dalam kerangka teori sistem politik David Easton, yang menempatkan aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat sebagai *input* dalam sistem politik, kemudian diproses untuk menghasilkan *output* berupa keputusan dan tindakan publik. Sikap responsif dan komunikatif *incumbent* terlihat ketika warga menyampaikan keluhan dalam kegiatan Reses / Kunjungan Dapil atau pertemuan, di mana laporan diterima secara terbuka dan ditanggapi tanpa penundaan, sehingga tercipta ruang dialog yang efektif dan mendorong kepercayaan masyarakat. Proses komunikasi ini bersifat persuasif karena *incumbent* tidak hanya mendengarkan, tetapi juga meyakinkan masyarakat bahwa aspirasi mereka akan ditindaklanjuti melalui langkah konkret, seperti menghubungi instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan pemasangan lampu jalan. Dengan demikian, *input* berupa keluhan warga diolah melalui komunikasi politik yang intens dan persuasif menjadi *output* berupa respons kebijakan dan tindakan nyata, yang menunjukkan bahwa perilaku politik anggota legislatif *incumbent* tidak sekadar simbolik, melainkan berorientasi pada penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Soreang.

Perilaku komunikatif dan persuasif anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang, Dalam Kerangka teori sistem politik David Easton, yang menempatkan aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat sebagai *input* dalam sistem politik, kemudian diproses untuk menghasilkan *output* berupa keputusan dan tindakan publik. Sikap responsif dan komunikatif *incumbent* terlihat ketika warga menyampaikan keluhan dalam kegiatan Reses / Kunjungan Dapil atau pertemuan, di mana laporan diterima secara terbuka dan ditanggapi tanpa penundaan, sehingga tercipta ruang dialog yang efektif dan mendorong kepercayaan masyarakat. Proses komunikasi ini bersifat persuasif karena *incumbent* tidak hanya mendengarkan, tetapi juga meyakinkan masyarakat bahwa aspirasi mereka akan ditindaklanjuti melalui langkah konkret, seperti menghubungi instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan pemasangan lampu jalan. Dengan demikian, (*input*) berupa keluhan warga diolah melalui komunikasi politik yang intens dan persuasif menjadi (*output*) berupa respons kebijakan dan tindakan nyata, yang menunjukkan bahwa perilaku politik anggota legislatif *incumbent* tidak sekadar simbolik, melainkan berorientasi pada penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Soreang.

Perilaku komunikatif dan persuasif anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang dalam teori sistem politik David Easton, yang memandang aspirasi dan keluhan masyarakat sebagai *input* yang masuk ke dalam sistem politik untuk kemudian diproses menjadi *output* berupa kebijakan atau tindakan pelayanan publik. Kemampuan komunikasi anggota legislatif *incumbent* dinilai sangat baik, tercermin dari kedekatan dan hubungan yang akrab dengan masyarakat sehingga warga merasa nyaman menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung. Interaksi yang terbuka ini memperlihatkan adanya kemauan *incumbent* untuk turun langsung ke lapangan sebagai bagian dari upaya menyerap *input* masyarakat. Meskipun dalam proses penindaklanjutan terdapat kendala struktural seperti keterbatasan anggaran dan efisiensi pengusulan pokok-pokok pikiran, komunikasi antara masyarakat dan anggota DPRD tetap terjaga dengan

baik, di mana warga dapat secara langsung menghubungi wakilnya saat membutuhkan respons. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku komunikatif dan persuasif *incumbent* berperan penting dalam mengalirkan *input* masyarakat ke dalam sistem politik, meskipun realisasi *output* pelayanan publik masih dipengaruhi oleh faktor kebijakan dan kapasitas anggaran yang ada.

Perilaku komunikatif dan persuasif anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik dapat dipahami melalui teori sistem politik David Easton yang memandang aspirasi dan keluhan masyarakat sebagai *input* yang masuk ke dalam sistem politik dan kemudian diproses menjadi *output* berupa kebijakan maupun tindakan pelayanan publik. Namri Nasir sebagai anggota DPRD Kota Parepare menunjukkan perilaku komunikatif dan persuasif melalui perannya sebagai penyalang lidah rakyat, di mana aspirasi masyarakat diserap, dikomunikasikan, dan diperjuangkan secara aktif dalam forum-forum resmi DPRD, khususnya rapat paripurna. Kemampuan ini mencerminkan komunikasi politik yang persuasif karena suara masyarakat tidak hanya disampaikan, tetapi juga diargumentasikan secara institusional agar memperoleh perhatian dan respons dari pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, Namri Nasir melaksanakan fungsi representasi, pengawasan, serta pembentukan kebijakan daerah dengan mengawal pelaksanaan regulasi dan program pemerintah agar tidak merugikan masyarakat. Dengan demikian, *input* berupa aspirasi publik diolah melalui proses komunikasi politik yang efektif dan persuasif dalam lembaga legislatif, sehingga menghasilkan *output* berupa sikap, kebijakan, dan pengawasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang adil dan responsif.

Penelitian penulis menjawab kekosongan yang belum tergali dalam studi (1) Iqbal Syafrudin dengan menggambarkan peran anggota badan legislatif perempuan dalam perspektif gender di DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI bahwa secara regulatif tidak terdapat hambatan dalam perilaku politik legislatif, namun tantangan utama justru muncul dalam praktik di lapangan, baik saat kampanye maupun ketika telah

terpilih. melalui teori sistem politik David Easton, yang menempatkan aspirasi, tuntutan, dan dukungan masyarakat sebagai *input* yang kemudian diproses dalam sistem politik untuk menghasilkan *output* berupa kebijakan atau tindakan pelayanan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota legislatif *incumbent* mampu membangun komunikasi yang intens, terbuka, dan persuasif dengan masyarakat, sehingga warga merasa nyaman menyampaikan keluhan dan aspirasi secara langsung. Kedekatan ini memungkinkan *incumbent* berperan sebagai *gatekeeper* yang menyerap *input* masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam forum formal seperti rapat dan pengusulan kebijakan, meskipun realisasi *output* masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan mekanisme birokrasi.

Penelitian ini menjawab kekosongan dari yang belum tergali dalam studi (2) Bella Putriwani dengan menggambarkan Strategi Politik *incumbent* dan apa yang menjadi faktor kekalahan pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Bangka bahwa pendekatan langsung kepada masyarakat merupakan strategi politik utama *incumbent* meskipun penelitian tersebut lebih menekankan pada strategi elektoral. Dalam Kerangka teori sistem politik David Easton yang memandang aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat sebagai *input* yang kemudian diproses dalam sistem politik untuk menghasilkan *output* berupa keputusan dan tindakan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *incumbent* bersikap responsif dan terbuka ketika warga menyampaikan keluhan dalam kegiatan Reses / Kunjungan Dapil atau pertemuan, sehingga tercipta ruang dialog yang efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Proses komunikasi tersebut tidak hanya bersifat komunikatif, tetapi juga persuasif, karena anggota legislatif berupaya meyakinkan warga bahwa aspirasi mereka akan ditindaklanjuti melalui langkah konkret, seperti berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian persoalan pelayanan publik.

Penelitian ini secara jelas juga menjawab kekosongan (3) dalam studi Nurfadilah Nasiruddin, yang menyoroti Strategi *Incumbent* dalam Pemenangan pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Maros bahwa komunikasi intens dan pendekatan

kekeluargaan menjadi strategi penting *incumbent* dalam membangun hubungan dengan masyarakat, meskipun penelitian tersebut lebih menekankan pada konteks kemenangan pemilu dan menggunakan teori pola interaksi sosial. Melalui teori sistem politik David Easton, yang memandang aspirasi dan keluhan masyarakat sebagai *input* yang masuk ke dalam sistem politik untuk kemudian diproses menjadi *output* berupa kebijakan dan tindakan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi *incumbent* dinilai sangat baik, tercermin dari kedekatan dan hubungan yang akrab dengan masyarakat sehingga warga merasa nyaman menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung, baik dalam kegiatan formal maupun interaksi sehari-hari. Pola komunikasi yang intens dan persuasif ini memperlihatkan kesediaan anggota legislatif untuk turun langsung ke lapangan sebagai upaya menyerap *input* masyarakat secara optimal.

2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* Terhadap Pelayanan Publik

a. Faktor Internal

Analisis terhadap faktor internal menunjukkan bahwa perilaku politik anggota legislatif *incumbent* di Kecamatan Soreang digerakkan oleh prinsip dasar teori pilihan rasional James S. Coleman, di mana aktor (legislator) menggunakan sumber daya (wewenang dan fungsi jabatan) untuk mencapai tujuan tertentu yang memberikan nilai manfaat. Motivasi internal untuk menuntaskan aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi pada periode sebelumnya merupakan bentuk tindakan rasional aktor dalam mengelola "kepentingan" konstituen guna menjaga keberlanjutan pengabdianya. Dalam hal ini, *incumbent* memandang fungsi pengawasan (*controlling*) dan perbaikan tata kelola pembangunan bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan sumber daya strategis yang dioptimalkan untuk menunjukkan konsistensi kinerja. Kesadaran untuk membenahi aturan dan pelaksanaan pembangunan mencerminkan perhitungan rasional bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik akan memperkuat posisi politiknya di mata masyarakat. Dengan demikian, perilaku politik tersebut merupakan hasil dari pilihan sadar aktor

untuk mengintegrasikan komitmen personal dengan pemanfaatan wewenang jabatan demi mewujudkan pelayanan publik yang berdampak luas di daerah pemilihannya.

Faktor internal seperti pengalaman, proses belajar, dan cara membangun hubungan dengan masyarakat sangat mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dalam pelayanan publik. Seiring waktu, mereka semakin memahami perannya sebagai wakil rakyat dan cenderung memprioritaskan konstituen yang telah memberikan dukungan. Jika dilihat melalui teori pilihan rasional dari James S. Coleman, tindakan ini dapat dipahami sebagai pilihan yang rasional, di mana aktor politik berusaha memaksimalkan keuntungan, dalam hal ini menjaga kepercayaan dan peluang untuk terpilih kembali. Fokus pada pendukung bukan hanya soal kedekatan emosional, tetapi juga strategi untuk mempertahankan legitimasi politik.

Komunikasi yang dilakukan secara rutin serta hubungan yang lebih personal berperan penting dalam membangun kedekatan antara anggota legislatif dan masyarakat. Kegiatan seperti pertemuan berkala atau pendekatan informal menunjukkan bahwa anggota legislatif tidak hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang menjaga jaringan kepercayaan. Dalam perspektif sosiologi, hal ini sejalan dengan pandangan Pierre Bourdieu yang menekankan pentingnya kapital sosial, yaitu jaringan, relasi, dan kepercayaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan posisi dalam struktur sosial. Dengan kata lain, kedekatan yang dibangun bukan hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga memperkuat posisi politik mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota legislatif *incumbent* memiliki kecenderungan kinerja yang lebih baik dibandingkan anggota legislatif yang baru terpilih, yang didukung oleh pengalaman serta rekam jejak yang telah dimiliki sebelumnya. Terpilihnya kembali mereka menjadi bukti bahwa masyarakat menilai kinerja tersebut efektif dan sesuai harapan. Dalam kerangka pilihan rasional, keputusan masyarakat untuk memilih kembali *incumbent* juga merupakan tindakan

rasional, karena mereka menilai manfaat yang sudah dirasakan sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perilaku politik *incumbent* dalam pelayanan publik tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tetapi juga oleh tuntutan untuk mempertahankan kepercayaan publik melalui kinerja yang nyata dan konsisten.

Faktor internal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang. Dalam teori pilihan rasional James S. Coleman, yang memandang aktor politik sebagai individu rasional yang bertindak berdasarkan perhitungan untung-rugi untuk memaksimalkan kepentingannya. *Incumbent* yang telah menjabat lebih dari satu periode dinilai memiliki kinerja pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan anggota legislatif yang baru terpilih, karena pengalaman, pengetahuan institusional, dan rekam jejak yang telah terbangun memungkinkan mereka memahami kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan bertindak lebih responsif. Dalam perspektif pilihan rasional, perilaku ini merupakan strategi rasional *incumbent* untuk mempertahankan dukungan dan legitimasi politik, mengingat pelayanan publik yang efektif menjadi modal penting dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. Terpilihnya kembali anggota legislatif tersebut mencerminkan adanya evaluasi positif dari pemilih terhadap manfaat nyata yang dirasakan, sehingga masyarakat secara rasional memberikan suara ulang kepada wakil yang dianggap mampu memenuhi harapan mereka. Dengan demikian, pengalaman politik, orientasi pada kinerja, dan motivasi untuk mempertahankan jabatan menjadi faktor internal utama yang membentuk perilaku politik *incumbent* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Soreang.

Berdasarkan teori pilihan rasional James S. Coleman, faktor internal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* di Kecamatan Soreang adalah optimalisasi sumber daya individu berupa pengalaman birokrasi dan jaringan kerja untuk mencapai tujuan efektivitas pelayanan. Sebagai aktor rasional, *incumbent* memilih untuk bersikap responsif dan memberikan solusi langsung terhadap keluhan masyarakat karena hal tersebut merupakan strategi paling efisien

dalam memperkuat modal sosial dan kepercayaan konstituen. Kemampuan untuk meminta proses yang berbelit-belit melalui koordinasi cepat dengan instansi pemerintah menunjukkan bahwa *incumbent* memanfaatkan pemahamannya terhadap mekanisme sistem sebagai instrumen untuk mewujudkan aspirasi publik secara tepat sasaran. Dengan demikian, perilaku politik yang tanggap ini merupakan hasil dari pilihan sadar aktor dalam mendayagunakan penguasaan informasi dan akses kekuasaan yang dimilikinya guna menghasilkan *output* pelayanan yang maksimal, yang pada akhirnya memberikan keuntungan timbal balik bagi stabilitas posisi politiknya di mata masyarakat.

Berdasarkan teori pilihan rasional James S. Coleman, faktor internal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dapat dipahami sebagai pertimbangan rasional yang bersumber dari kesadaran, pemahaman, dan komitmen pribadi aktor politik dalam mengambil keputusan. Temuan wawancara menunjukkan bahwa Bapak Namri Nasir menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme pokok-pokok pikiran sebagai bentuk pilihan rasional untuk memperjuangkan kebutuhan publik dalam kerangka prosedur yang berlaku. Sikap ini mencerminkan orientasi pelayanan dan tanggung jawab internal dalam menjalankan fungsi representasi, meskipun ia menyadari bahwa tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan secara maksimal. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Parepare Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, Namri Nasir memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan kebijakan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan daerah, khususnya melalui pengawalan pokok-pokok pikiran agar dapat diakomodasi dalam APBD. Dengan demikian, faktor internal berupa pemahaman terhadap prosedur kelembagaan, komitmen terhadap pelayanan publik, serta sikap realistis terhadap keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi dasar pilihan rasional yang mempengaruhi perilaku politik *incumbent* dalam menjalankan pelayanan publik

b. Faktor Eksternal

Kerangka teori pilihan rasional James S. Coleman memandang tuntutan dan harapan masyarakat sebagai faktor eksternal yang menjadi lingkungan sosial penyedia insentif bagi aktor, dalam hal ini anggota legislatif, untuk bertindak. Tuntutan warga terhadap perbaikan infrastruktur jalan dan kepedulian yang lebih nyata merupakan bentuk tekanan eksternal yang memaksa *incumbent* melakukan kalkulasi rasional guna mempertahankan dukungan pemilih. Sesuai dengan konsep Coleman mengenai hubungan antara kepentingan individu dan sistem sosial, *incumbent* menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan riil masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas adalah prasyarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik (*trust*). Oleh karena itu, perilaku politik yang berfokus pada perbaikan sarana publik bukan sekadar tindakan altruistik, melainkan respons strategis aktor dalam mengelola harapan konstituen sebagai sumber daya politik yang krusial untuk keberlanjutan masa jabatan mereka.

Kondisi pelayanan birokrasi di instansi pemerintah daerah menjadi faktor eksternal yang turut menentukan perilaku politik *incumbent*. Meskipun pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial seperti PKH dinilai sudah berjalan baik, adanya ketimpangan pada pembangunan infrastruktur lorong permukiman menciptakan celah kebutuhan yang harus diisi oleh peran advokasi legislatif. Dalam pandangan Coleman, situasi ini menempatkan *incumbent* dalam posisi untuk mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar antara birokrasi dan kebutuhan warga. Perilaku politik *incumbent* yang mendorong pemerataan pembangunan di wilayah yang belum tersentuh merupakan upaya rasional untuk meningkatkan nilai manfaat (*utility*) pelayanan publik di mata masyarakat. Dengan bertindak sebagai jembatan antara efisiensi birokrasi dan ketertinggalan infrastruktur wilayah, *incumbent* berupaya memastikan bahwa sistem politik memberikan *output* yang adil, sekaligus mengamankan legitimasi politik mereka di tingkat lokal.

Perspektif teori pilihan rasional James S. Coleman, komitmen terhadap realisasi janji politik merupakan bentuk norma dan ekspektasi sosial yang menjadi faktor

eksternal utama dalam menentukan perilaku politik *incumbent*. Masyarakat, sebagai aktor yang memiliki kepentingan atas pelayanan publik, memberikan "mandat" kepada legislatif dengan ekspektasi adanya timbal balik berupa program nyata. Realisasi janji kampanye dipandang sebagai indikator tanggung jawab yang secara rasional harus dipenuhi oleh *incumbent* untuk menghindari sanksi sosial berupa hilangnya kepercayaan publik. Dalam hal ini, tuntutan masyarakat berfungsi sebagai kendala eksternal yang memaksa aktor politik untuk menyelaraskan tindakan pribadinya dengan kepentingan kolektif demi menjaga stabilitas hubungan antara wakil rakyat dan konstituen di Kecamatan Soreang.

Berdasarkan teori pilihan rasional James S. Coleman, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dapat dipahami sebagai kondisi lingkungan dan tekanan struktural yang mendorong aktor politik mengambil tindakan rasional guna memaksimalkan kepentingan publik dan menjaga akuntabilitas pemerintahan. Keluhan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan daerah menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam membentuk perilaku politik Bapak Namri Nasir sebagai anggota legislatif *incumbent*, meskipun kewenangan pembangunan berada pada ranah eksekutif. Dalam situasi tersebut, tindakan rasional yang diambil adalah bersikap aktif menjalankan fungsi pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, seperti proyek fiktif, ketidakjelasan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai ketentuan. Sebagai anggota DPRD Kota Parepare Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, Namri Nasir memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi kebijakan dan program pemerintah daerah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengawal akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, dinamika pembangunan daerah, kebijakan pemerintah, dan tuntutan masyarakat menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan rasional anggota legislatif *incumbent* dalam menjalankan fungsi pengawasan demi terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Teori pilihan rasional James S. Coleman, Mengenai perilaku politik Namri Nasir sebagai legislatif *incumbent* dipahami melalui skema perpindahan dari level makro (lingkungan sosial) ke level mikro (tindakan individu). Faktor eksternal berupa tuntutan masyarakat terkait program bedah rumah, bantuan sosial, dan kelanjutan program pemerintah kota tahun 2025 bertindak sebagai sumber daya (*resources*) dan sekaligus batasan (*constraints*) yang menentukan arah tindakan rasional aktor. Dalam pandangan Coleman, aktor melakukan tindakan yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan mereka dalam hal ini, pemenuhan aspirasi konstituen merupakan investasi rasional bagi *incumbent* untuk menjaga basis dukungan dan legitimasi politik. Ketergantungan aktor terhadap struktur sosial (harapan masyarakat) menciptakan sebuah sistem pertukaran, di mana responsivitas terhadap pelayanan publik adalah strategi optimal untuk mencapai tujuan politik di tengah dinamika kebijakan pemerintah daerah yang fluktuatif.

Akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik merupakan tuntutan yang menjadi faktor eksternal penting dalam memengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent*. Kehadiran DPRD dalam mencegah terjadinya pembangunan fiktif atau kegiatan yang tidak jelas pelaksanaan dan anggarannya menunjukkan adanya dorongan lingkungan institusional dan sosial yang menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih. Secara rasional, *incumbent* memahami bahwa sikap tegas dalam mengawal anggaran dan pembangunan akan meningkatkan citra politik serta memperkuat legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas bukan hanya mencerminkan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan pilihan rasional untuk memastikan pelayanan publik melalui pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kecamatan Soreang.

Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* terhadap pelayanan publik di Kecamatan Soreang, dalam perspektif teori pilihan rasional James S. Coleman, berkaitan erat dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta dinamika kebijakan di lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan hasil temuan, kebutuhan masyarakat akan program sosial dan pembangunan, seperti bedah rumah dan bantuan sosial, menjadi dorongan eksternal yang mendorong *incumbent* bertindak secara responsif dan strategis. Dalam kerangka pilihan rasional, anggota legislatif memandang pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai tindakan yang memberikan manfaat kolektif sekaligus keuntungan politik berupa dukungan dan legitimasi dari masyarakat. Selain itu, komitmen dalam mengawal kebijakan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk mendorong realisasi kembali program-program yang sempat tertunda, menunjukkan bahwa perilaku politik *incumbent* dipengaruhi oleh pertimbangan rasional terhadap efektivitas kebijakan publik. Dengan menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi secara aktif, anggota legislatif berupaya memastikan pelayanan publik berjalan optimal, sehingga kepentingan masyarakat dapat terpenuhi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja politik *incumbent*.

Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dapat dipahami dengan teori pilihan rasional James S. Coleman, sebagai keterbatasan struktural yang membentuk pilihan dan tindakan rasional aktor politik dalam memperjuangkan pelayanan publik. Temuan wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran daerah dan kebijakan efisiensi APBD menjadi faktor eksternal utama yang mempengaruhi perilaku politik Bapak Namri Nasir, di mana meskipun aspirasi masyarakat telah disalurkan melalui pokok-pokok pikiran, realisasi program belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana terlihat pada program bedah rumah yang hanya terealisasi enam dari lima belas rumah yang direncanakan. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Parepare Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, Namri Nasir memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan kebijakan dan pelaksanaan anggaran, pengawalan program pemerintah daerah, serta advokasi kepentingan masyarakat dalam proses penganggaran. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran, kondisi keuangan daerah, dan keputusan pemerintah daerah menjadi faktor eksternal yang secara rasional mempengaruhi perilaku politik

incumbent dalam menentukan strategi advokasi dan pengawasan guna mengoptimalkan pelayanan publik sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Berdasarkan teori pilihan rasional James S. Coleman, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dapat dipahami sebagai kondisi lingkungan dan struktur kebijakan yang membentuk pilihan rasional aktor politik dalam bertindak demi mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif. Temuan penelitian menunjukkan perubahan kebijakan pendataan penerima bantuan dari DTKS ke DTKN menjadi faktor eksternal yang signifikan karena menimbulkan keluhan masyarakat akibat hak yang tidak terpenuhi, sehingga mendorong Bapak Namri Nasir sebagai anggota legislatif *incumbent* untuk mengambil tindakan rasional dengan merespons dan mengadvokasi perbaikan sistem pelayanan publik. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Parepare Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, Namri Nasir memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembahasan kebijakan dan peraturan daerah, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Melalui peran tersebut, ia menjalankan fungsi advokasi kebijakan dengan membangun sinergi bersama Wali Kota dan mengusulkan penggabungan data kelurahan dan Dinas Sosial sebagai strategi rasional untuk memperbaiki sistem pendataan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perilaku politik anggota legislatif *incumbent* di Kecamatan Soreang Kota Parepare secara umum dinilai positif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mereka dianggap representatif dan responsif karena mampu menyerap aspirasi melalui reses dan menindaklanjutinya secara nyata di lapangan, yang juga didukung oleh peran dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam hal advokasi kebijakan, terdapat upaya mendorong pelayanan yang lebih efektif, seperti sistem pelayanan satu pintu. Selain itu, kemampuan komunikatif dan persuasif terlihat dari kedekatan dengan masyarakat serta aktif memperjuangkan aspirasi dalam forum resmi. Meski masih ada praktik politik uang dan harapan peningkatan kehadiran di lapangan, secara keseluruhan perilaku ini telah membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat.
2. Perilaku politik anggota legislatif *incumbent* dalam pelayanan publik di Kecamatan Soreang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, hal ini terbentuk dari pengalaman, pemahaman peran, komitmen memperjuangkan aspirasi, serta kemampuan komunikasi dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Sementara secara eksternal, dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kebijakan pemerintah, perbedaan kepentingan, serta kondisi birokrasi dan infrastruktur. Karena itu, perilaku politik *incumbent* cenderung adaptif dan realistis, tetap berupaya melayani masyarakat dengan menyesuaikan kondisi yang ada.

B. Saran

1. Saran bagi anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Anggota legislatif *incumbent*, di Kecamatan Soreang Kota Parepare diharapkan dapat terus memperkuat pola

komunikasi yang responsif dan transparan dengan masyarakat, tidak hanya pada momentum Reses / Kunjungan Dapil, tetapi juga melalui mekanisme pengaduan dan pemantauan rutin. Selain itu, perlu ditingkatkan sinergi yang lebih terstruktur antara DPRD, pemerintah daerah, dan perangkat teknis terkait, khususnya dalam validasi data penerima bantuan dan perencanaan program prioritas, agar keterbatasan anggaran dapat diantisipasi melalui perencanaan yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berkeadilan.

2. Saran bagi masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare diharapkan dapat terus berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta memanfaatkan ruang-ruang partisipasi seperti Musrenbang dan Reses / Kunjungan Dapil DPRD agar pelayanan publik semakin responsif terhadap kebutuhan nyata warga. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan pendekatan penelitian, misalnya dengan membandingkan perilaku politik *incumbent* dan non-*incumbent* atau menggunakan pendekatan kuantitatif, guna memperkaya kajian tentang dinamika perilaku politik legislatif terhadap pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Admods. “Anggota DPRD Parepare Andi Fudail Reses, Serap Dan Siap Perjuangkan Aspirasi Warga Soreang.” Delik.id, 2024.
- Amrin. “Legislatif Di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2014 Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negri Makassar (Uin) Alauddin.” Universitas Islam Negri Makassar (UIN) Alauddin, 2016.
- Andi Muhammad Ridwan. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Efektifitas Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Pelayanan Masyarakat Pada Kelurahan Wattangsoreang Kecamatan Soreang Kota Parepare.” *Jurnal Nobel Management Review* 3, no. 3 (2022): 452–64.
- Bakri, Muhiddin. “Merenden Tedong Di Mamasa: Integrasi Pendekatan Struktural Dan Kultural Dalam Memitigasi Konflik Sosial Keagamaan.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/DOI:http://10.24256/pal.v9i2.5220>.
- Bakri, Wahyuddin. *Hegemoni Politik, Kekuasaan, Dan Media*. Parepare: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Dewi, susi fitria. “Sosiologi Politik.” Gre publishing, 2017.
- Erik Porawouw. “Tugas Dan Fungsi Dprd Propinsi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Menurut Uu No 27 Tahun 2009.” *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014): 1–17.
- Fadrullah, Iqbal. “Memahami Sistem Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang Dalam Perspektif Teori Gabriel Almond Dan David Easton.” *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2024): 208–19.
- Fakih, Moh. “Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Masa Pandemi.” *UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMICC CENTRE SUDIRMAN GUPPI*, 2021, 1–27.
- Hamid, Ihsan. *Perilaku Politik Diealektika Teoritis Empiris Untuk Penguatan Demokrasi Di Era Post Truth*. Edited by Muhammad Amalahanif. Sanabil, 2020.
- Hanifah, Hani, Susi Susanti, and Aris Setiawan Adji. “Perilaku Dan Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Tujuan Pembelajaran.” *Manazhim* 2, no. 1 (2020): 105–17. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v2i1.638>.

- Hartati, Riana. "Perilaku Politik Budaya Jawa Dalam Warga Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur." *Politics and Islamic Civilization* 2, no. 1 (2021): 15–24.
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahran Jailani, and Asbui. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah." *Journal Genta Mulia* 15, no. 0 (2024): 70–78.
- Istilah, Pengertian dan. "Pengertian Perilaku Dan Ruang Lingkupnya." Kumparan, 2023.
- K. Tuaputimain, Dominggas, and Fientje Palijama. "Optimalisasi Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Kamarian Kabupaten Seram Bagian Barat." *Hipotesa - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 2 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.69774/hipotesa.v18i2.94>.
- K, Ahmad. "Respon Masyarakat Terhadap Perilaku Aparat Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan." *Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 190–97.
- Kaira. "Laporan Kinerja Anggaran DPRD Parepare." dprdparepare.org, 2025.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Mursalim, Siti Widharetno. "Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)* XV, no. 1 (2018): 1–16.
- Nasiruddin. "Strategi Incumbent Dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Maros." *Jurnal Ilmu Sosial Politik* 5, no. 2 (2022): 193–202.
- Nila Sastrawati. "ECG, November 2019." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 167–296. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2018.12.015>.
- Nur Rohmah. "Evaluasi Responsivitas Sistem Penanganan Dan Pengaduan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Kota SEMARANG." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, no. 1 (2023): 1–14.
- Nurhadi. "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2018): 137–50.
- Pinton Setya Mustafa. *Metodelogi Penelitian Kuantitaif,Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Mojokerto: Inshigt meditama,

2022.

Putriwani, Bella. "STRATEGI POLITIK INCUMBENT DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKALAHAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 KABUPATEN BANGKA Bella Putriwani Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Email : Bellaputrybella998@gmail.Com Fakultas Ilmu Sosial Dan I." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2022, 1–9.

Ramadhan, Arif Mukti. "Pengertian Dan Macam-Macam Kerangka Berpikir Penelitian." ebizmark blog, 2023.

Rohim, Abdul. "Perilaku Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Kader Parpol Dan Wakil Masyarakat." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021, 1–100.

Rustamana, Agus Nurul Rohmah Putri Frilly Natasya Rendy Raihan. "Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif." *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN* 5, no. 5 (2024): 1–10.

Saleh, Sirajuddin. "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung." *Analisis Data Kualitatif* 1 (2017): 180.

Senjaya, Ihsan Wira. "Kebijakan Publik Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Batang :Analisis Teori David Easton." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 825–32.

Syafrudin, Iqbal, Idris Ahmad, and August Hamonangan. "Peran Anggota Badan Legislatif Perempuan Dalam Perspektif Gender (Study Perilaku Politik 2 Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia) Nama." *Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 176–81.

Tampubolon, Khairuddin, and Nunti Sibuea. "Peran Perilaku Guru Dalam Menciptakan Disiplin Siswa." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 2, no. 4 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i4.467>.

Wira, Choirifiqa Widya Nadzifah. "Hubungan Personal Kandidat, Program Kandidat, Dan Lingkungan Sosial Pemilih Terhadap Orientasi Memilih Generasi Millenial Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." Universitas Airlangga, 2019.

Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." *Quanta* 2, no. 2 (2018): 83–91.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : M.IKHRAM
 NIM : 2020203869201023
 FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
 PRODI : SOSIOLOGI AGAMA
 JUDUL : PERILAKU POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF
 INCUMBENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
 Alamat :
 Jenis kelamin :
 Umur :

a. Bagaimana perilaku politik anggota legislatif incumbent terhadap pelayanan publik ?

1. Bisa Bapak/Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang politik dan pengalaman Bapak/Ibu sebagai anggota legislatif?
2. Apa motivasi Bapak/Ibu mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif (incumbent)?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa tugas utama anggota DPRD yang paling penting saat berurusan dengan pelayanan publik bagi masyarakat?
4. Selama Bapak/Ibu menjabat, pelayanan publik apa saja yang sedang Bapak/Ibu perjuangkan?
5. Apakah ada perubahan dalam pendekatan pelayanan publik yang Bapak/Ibu lakukan selama masa jabatan pertama dibandingkan menjelang masa pemilihan kembali?
6. Apa tanggapan Bapak/Ibu terhadap anggapan bahwa menjelang pemilu, perilaku politik incumbent cenderung lebih populis?

7. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami dilema antara kepentingan partai dan kepentingan masyarakat? Jika ya, bagaimana Bapak/Ibu menghadapinya?
8. Apa ada strategi komunikasi politik Bapak/Ibu untuk membangun pelayanan publik yang baik di mata masyarakat?
9. Apa tantangan utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam menyeimbangkan kepentingan politik dan pelayanan publik?
10. Apa harapan dan rencana Bapak/Ibu ke depan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik jika terpilih kembali?
11. Apa yang ingin Bapak/Ibu sampaikan kepada masyarakat mengenai tugas anggota legislatif dalam pelayanan publik?

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif incumbent terhadap pelayanan publik ?

1. Menurut Bapak/ Ibu Apa ada yang menjadi kendala bapak/ibu dalam menjalankan tugas untuk menindak lanjuti keluhan masyarakat
2. Sejauh mana motivasi pribadi (misalnya: keinginan membangun daerah, citra politik, atau popularitas) mempengaruhi keputusan politik Bapak/Ibu?
3. Bagaimana peran partai politik dalam memengaruhi kebijakan atau sikap politik Bapak/Ibu terkait pelayanan publik?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa terikat oleh instruksi atau garis kebijakan partai dalam merespons isu-isu pelayanan publik?
5. Seberapa besar pengaruh aspirasi atau tekanan dari masyarakat terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam hal pelayanan publik?
6. Apakah masukan dari masyarakat menjadi pertimbangan utama Bapak/Ibu dalam menyusun atau mendukung kebijakan publik?
7. Apakah masa kampanye atau mendekati pemilu membuat Bapak/Ibu lebih aktif dalam kegiatan pelayanan publik?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah incumbent cenderung melakukan pelayanan publik lebih intensif saat mendekati pemilu? Jika ya, mengapa?
9. Apakah regulasi atau mekanisme di DPRD/legislatif memengaruhi cara Bapak/Ibu terlibat dalam pelayanan publik?
10. Bagaimana hubungan antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif memengaruhi efektivitas pelayanan publik yang Bapak/Ibu dukung?

11. Di antara berbagai faktor yang telah dibahas, menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi perilaku politik Bapak/Ibu dalam pelayanan publik?
12. Bagaimana Bapak/Ibu menyeimbangkan antara kepentingan politik, kepentingan masyarakat, dan tuntutan partai?
13. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 5 November, 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Dr.H. Muhiddin Bakri , Lc., M.Fill.I.
NIP. 19760713 200912 1 002

PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : M.IKHRAM
 NIM : 2020203869201023
 FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
 PRODI : SOSIOLOGI AGAMA
 JUDUL : PERILAKU POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF *INCUMBENT*
 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
 Alamat :
 Jenis kelamin :
 Umur :

a. Bagaimana perilaku politk anggota legislatf *incumbent* terhadap pelayanan publik ?

1. Menurut Anda,Apakah Bapak /Ibu mengetahui Apa itu Perilaku politik ?
2. Menurut Anda ,Apakah anda mengetahui siapa saja anggota legislatif yang terpilih kembali menjadi anggota legislatif ?
3. Menurut Anda, bagaimana kinerja anggota legislatif yang saat ini masih menjabat (*incumbent*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
4. Apakah Anda merasa anggota legislatif *incumbent* sering turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi warga?
5. Apakah Anda pernah mengalami kendala atau keluhan dalam menerima pelayanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun bidang lainnya?

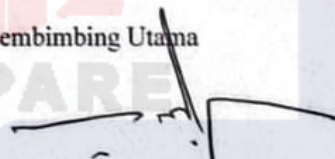
6. Se jauh mana Anda mengetahui atau merasakan program pelayanan publik yang dilakukan oleh anggota legislatif incumbent di daerah Anda?
 7. Bagaimana tanggapan Anda terhadap sikap dan perilaku anggota legislatif incumbent saat menghadapi keluhan atau kebutuhan masyarakat?
 8. Apakah menurut Anda, anggota legislatif incumbent hanya aktif menjelang pemilihan umum?
 9. Bagaimana cara anggota legislatif incumbent berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi atau program kerja mereka?
 10. Apakah Anda merasa ada perubahan pelayanan publik sejak anggota legislatif incumbent menjabat? Jika iya, seperti apa perubahannya?
 11. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh perilaku politik anggota legislatif incumbent terhadap kualitas pelayanan publik yang Anda rasakan?
 12. Apa harapan Anda terhadap perilaku politik dan pelayanan publik dari anggota legislatif incumbent ke depannya?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku politik anggota legislatif incumbent terhadap pelayanan publik ?**
1. Menurut Bapak/Ibu, seberapa sering Bapak/Ibu melihat anggota dewan incumbent ini turun ke lapangan atau bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan?
 2. Apakah Bapak/Ibu merasa mudah untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi kepada anggota dewan incumbent ini dan mendapatkan tindak lanjut?
 3. Apakah Anda merasa bahwa perilaku politik anggota legislatif incumbent dipengaruhi oleh persiapan untuk pemilu atau faktor elektoral lainnya? Misalnya, apakah mereka lebih memperhatikan pelayanan publik menjelang pemilu?
 4. Apakah anggota DPR/DPRD yang menjabat (incumbent) lebih mementingkan perintah dari partainya atau kepentingan masyarakat saat bekerja?
 5. Saat ada masalah penting di lingkungan kita (contoh: jalan rusak, banjir, sulit cari kerja), apakah anggota DPR/DPRD yang menjabat (incumbent) cepat turun tangan dan memberikan solusi?

6. Menurut Anda, sejauh mana anggota legislatif incumbent merespons keluhan atau aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik? Apakah Anda merasa suara masyarakat dihargai atau tidak?
7. Jika dibandingkan dengan anggota dewan lain yang bukan incumbent (yang baru), apakah Bapak/Ibu melihat perbedaan besar dalam cara mereka melayani masyarakat? Jika ada tolong di jelaskan perbedaannya.
8. Menurut Anda, Jika anggota DPR/DPRD yang menjabat (incumbent) bekerja secara terbuka (mudah dilihat) dan bertanggung jawab, apakah pelayanan publik yang mereka berikan jadi lebih baik?
9. Jika Bapak/Ibu bisa meminta satu hal, apa harapan terbesar Bapak/Ibu agar anggota dewan ini benar-benar tulus saat melayani kita?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 6 November, 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama


Dr.H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fill.I.
NIP. 19760713 200912 1 002



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-2230/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 03 Juli 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 2230 Tahun 2024, tanggal 03 Juli 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : M.IKHRAM
NIM : 2020203869201023
Program Studi : Sosiologi Agama
Judul Penelitian : PERILAKU POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF INCUMBENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SOREANG
- Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 03 Juli 2024
Dekan,



Dr. A. Nurkldam, M.Hum.
NIP 196412311992031045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2550/In.39/FUAD.03/PP.00.9/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

13 November 2025

Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : M.IKHRAM
Tempat/Tgl. Lahir : MAKASSAR, 17 Desember 2001
NIM : 2020203869201023
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sosiologi Agama
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JL.KAMPUNG DURI KEC. SOREANG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Walikota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERILAKU POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF INCUMBENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SOREANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal **13 November 2025** sampai dengan tanggal **13 Desember 2025**.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000876



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 876/IP/DPM-PTSP/11/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **M. IKHRAM**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **SOSIOLOGI AGAMA**
ALAMAT : **JL. KAMPUNG DURI PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERILAKU POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF INCUMBENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SOREANG**

LOKASI PENELITIAN : **1. SEKRETARIAT DPRD KOTA PAREPARE
2. KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 November 2025 s.d 13 Desember 2025**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **18 November 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)







**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 893.7 /95/ KCS

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : B-2550/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/11/2025, Tanggal 13 November 2025 Perihal Izin Penelitian dengan judul "PRILAKU POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF INCUMBENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SOREANG" terhitung mulai tanggal 13 November 2025 s.d. 13 Desember 2025.

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

Nama	: M. IKHRAM
Jenis Kelamin	: LAKI LAKI
Universitas/Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sosiologi Agama
Alamat	: Jl. Kampung Duri Kec. Soreang Kota Parepare.

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 400.7.22/02/KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. HARIYADI, SE**
Nip : **198011042010011015**
Jabatan : **Sekretaris Camat Soreang**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **M. IKHRAM**
Universitas/Lembaga : **Instut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare**
Jurusan : **Ushuluddin, Adab dan Dakwah/Sosiologi Agama**
Alamat : **Jl. Kampung Duri Kec. Soreang Kota Parepare**

Telah selesai melakukan penelitian di **SEKRETARIAT DPRD KOTA PAREPARE DAN KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE** selama 1 Bulan, terhitung mulai tanggal 13 November 2025 s.d 13 Desember 2025, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"PRILAKU POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF INCUMBENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 04 Maret 2026
CAMAT SOREANG,

H. HARIYADI, SE
Penata Tawar III/d
NIP. 198011042010011015

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Status : Ketua DPRD Parepare
 Usia : 58 Tahun
 Alamat : Rumah Jabatan Ketua DPRD Jur. 2 Bindilipu

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M. Ikhran untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Februari, 2026

Yang Bersangkutan


 Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NAMEI MASIR
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Agama : ISLAM
 Status : Anggota Komisi 1 DPRD Parepare
 Usia : 19 Tahun
 Alamat : JL. Pettaunga

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M.Ikhram untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 November 2015

Yang Bersangkutan


 NAMEI

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dra. Hj. Asmawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Komisaris DPRD Parepare
Usia : 60 TAHUN
Alamat : Jl. JEND. SUPRIATNO NO 105 A

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M. Ikhran untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Februari, 2020

Yang Bersangkutan


Dra. HJ. ASMAWATI

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IMAM
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Status : Menikah
Usia : 35 Tahun
Alamat : Jl. Laupe (Lorong Akper)

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M.Ikhram untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 November 2015

Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

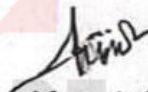
Nama : AGUS ASBAR
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : ISLAM
Status : Warga Kca. Soreang
Usia : 57 Tahun
Alamat : Jl. Kampung Puri

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M.Ikhram untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 November, 2025

Yang Bersangkutan


AGUS ASBAR

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

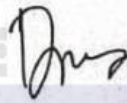
Nama : DARMA
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Status : Kelua RT.003
Usia : 45 Tahun
Alamat : JL. Kesadaran

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M.Ikhram untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 November 2025

Yang Bersangkutan


DARMA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Azis
Jenis Kelamin : laki
Agama : Islam
Status :
Usia : 52 tahun
Alamat : K. P. A. Mayang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M.Ikhrum untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari, 2026

Yang Bersangkutan

Azis

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

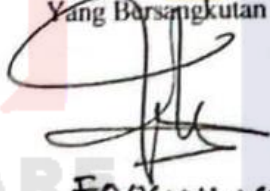
Nama : FAOSIAH ACO
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Status : MENIKAH
Usia : 57 TAHUN
Alamat : RT11 PERDOK INDAH SOREANG BLOK-D-1.

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M.Ikhrum untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15, Januari, 2026

Yang Bersangkutan


FAOSIAH ACO

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ARSYAD ADAAM
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Masyarakat
Usia : 41 thn
Alamat : Jl. Jend. A. Yani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M. Ikhrum untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari, 2016

Yang Bersangkutan


ARSYAD ADAM

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marham Hakim
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status :
 Usia : 53 tahun
 Alamat : Jl. Andi Mappangulung

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M. Ikhran untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16, Februari, 2026

Yang Bersangkutan


 marham hakim

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SITI NUZHAYATI
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Status : IBU
Usia : 59 TAHUN
Alamat : JL. LORONG ABEP

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M. Ikhran untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan 16 Februari 2026


Siti Nuzhayati .T

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Erma
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Ibu rumah tangga
Usia : 40 tahun
Alamat : Jl. Kampung Duri

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M.Ikhrum untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Desember, 2015
Yang Bersangkutan


ERMA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

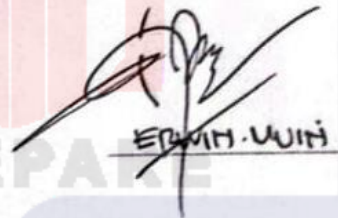
Nama : ERWIN . MUJI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Status : MENDAH
Usia : 51 THN
Alamat : Jl. Jend. A. Yani km 5 no. 20 PAREPARE

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M.Ikhram untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Perilaku Politik Anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan


ERWIN . MUJI





M. Ikhrum 2020203869201023.docx

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id	3%
	Internet Source	
2	journal.ubpkarawang.ac.id	1%
	Internet Source	
3	batampos.co.id	<1%
	Internet Source	
4	repositori.unsil.ac.id	<1%
	Internet Source	
5	ojs.unsulbar.ac.id	<1%
	Internet Source	
6	Submitted to Universitas Putera Batam	<1%
	Student Paper	
7	Submitted to Universitas Islam Bandung	<1%
	Student Paper	
8	Submitted to SDM Universitas Gadjah Mada	<1%
	Student Paper	
9	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
	Internet Source	
10	Submitted to unimal	<1%
	Student Paper	
11	Submitted to Politeknik Negeri Medan	<1%
	Student Paper	
12	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	<1%

BIODATA PENULIS



M. Ikhrum Lahir pada 17 Desember 2001 di Makassar. Putra dari pasangan ayah kandung bernama Mangguling dan Ibu kandung bernama Rosdiah. Penulis mulai memasuki pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 73 Parepare dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 12 Parepare pada tahun 2017. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Sosiologi Agama, akhir penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di Desa Rappang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos), penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Perilaku Politik anggota Legislatif *Incumbent* terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang.”